

**IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BRI
SYARIAH KCP BOJONEGORO PADA UMKM DI KECAMATAN
SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana
Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Ekonomi Perbankan Syari'ah (S.E)*

Oleh:

MOHAMMAD RIFKY BAYHAQI

NIM. 15540040



**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BRI
SYARIAH KCP BOJONEGORO PADA UMKM DI KECAMATAN
SUGIHWARASKABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

Oleh

MOHAMMAD RIFKY BAYHAQI

NIM : 15540040

Dosen Pembimbing,



Kusnudin, S.Pi., M.Ei

NIDT. 19700617201608011052

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR) BRI SYARIAH KCP BOJONEGORO PADA UMKM DI
KECAMATAN KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI



Oleh:

MOHAMMAD RIFKY BAYHAQI
NIM: 15540040

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 13 September 2019

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

- | |
|--|
| 1. Ketua Penguji
<u>Bariato Nurasri Sudarmawan, ME</u> : ()
NIDT. 19920720201802011191 |
| 2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
<u>Khusnudin, S.Pi., M.Ei</u> : ()
NIDT. 19700617201608011052 |
| 3. Penguji Utama
<u>Segaf, S.E., M.Sc</u> : ()
NIDT. 19760215201608011049 |



Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Eko Suprayitno, SE., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003 /*e*



HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Rifky Bayhaqi
NIM : 15540040
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syari'ah

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan lulusan pada Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul : **IMPLEMENTASI PROGAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BRI SYARIAH KCP BOJONEGORO PADA UMKM DI KECAMATAN SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO** adalah hasil karya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 10 Oktober 2019

Hormat saya,



Mohammad Rifky Bayhaqi

NIM: 15540040

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan karya ini untuk orang yang penulis sayangi, Bapak dan Ibu tercinta.

Bapak dan Ibu terimakasih atas limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.

Teman-teman Perbankan Syari'ah A 2015 senasib, seperjuangan dan sepenanggungan, terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti. Semoga tak ada lagi duka nestapa di dada tapi suka dan bahagia juga tawa dan canda.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal. Aaminn.



HALAMAN MOTTO

"Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu."

(Marcus Aurelius)



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul **“Implementasi Progam Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Syariah KCP Bojonegoro pada UMKM Di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro”**

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-salam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Malang.
4. Bapak Khusnudin, S.Pi.,M.Ei., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dalam bimbingan, petunjuk, dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teoritis	12
2.2.1 Implementasi Kebijakan	12
2.2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Syariah	15
2.2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	19
2.3 Kerangka Berfikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
3.2 Lokasi Penelitian	24
3.3 Subjek Penelitian	25
3.4 Data dan Jenis Data	25
3.4.1 Data Primer	25
3.4.2 Data Sekunder	26

3.4.3 Penentuan Informan	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6 Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Implementasi Kebijakan KUR di BRI Syariah	31
4.2 Dampak Impelementasi Kebijakan KUR bagi UMKM	46
4.2.1 Content of Policy	47
4.3 Context of Policy	51
4.3.1 Bagaimana kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan	51
4.3.2 Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran	52
4.4 Hambatan upaya pemerintah dalam menyalurkan UMKM	62
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kredit Usaha Rakyat BRI Syariah KCP Bojonegoro	3
Tabel 1.2 Jumlah UMKM Kabupaten Bojonegoro	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.2 Kerangka Penelitian	22
Tabel 4.1 Temuan Lapangan	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara	72
Lampiran 2. Hasil Wawancara	78



ABSTRAK

MOHAMMAD RIFKY BAYHAQI, 2019, SKRIPSI, “Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Syariah KCP Bojonegoro Pada UMKM Di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro”

Pembimbing : Khusnudin, M.Ei

Kata Kunci : Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Peningkatan UMKM memberikan suatu tantangan yang harus ditingkatkan dan harus memberikan kontribusi yang baik, termasuk dukungan pembiayaan dalam program kredit usaha rakyat yang ada di perbankan yang ada di BRI Syariah. KUR merupakan suatu program yang mempunyai manfaat cara untuk mengurangi kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan yaitu kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak dan barang-barang pokok yang lainnya ikut naik. Kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin tidak mampu menikmati pelayanan dasar seperti akses air minum, sanitasi, pendidikan dasar menengah dan akses fasilitas kesehatan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ada sepuluh orang. Data di kumpulkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilaksanakan di Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro dan UMKM di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

Dari hasil penelitian, UMKM yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki nasabah dengan jumlah yang banyak yaitu pada Kecamatan Sugihwaras Pada Program KUR yang ada di Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan Pengaruh yang sangat signifikan terhadap UMKM yang ada di Kecamatan Sugihwaras. Dengan adanya program KUR mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran.

Hal ini berhubungan dengan peningkatan dalam kesejahteraan bagi UMKM yang ada di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini memberikan modal bagi para pelaku UMKM sehingga mereka dapat terus menjalankan usahanya tanpa khawatir masalah modal.

ABSTRACT

MOHAMMAD RIFKY BAYHAQI, 2019, SKRIPSI, "Implementation of the BRI Syariah People's Business Credit Program (KUR) Bojonegoro KCP At MSMEs in Sugihwaras District, Bojonegoro Regency"

Supervisor: Khusnudin, M.Ei

Keywords: Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro, People's Business Credit Program (KUR)

The increase in MSMEs presents a challenge that must be increased and must provide a good contribution, including financial support in the people's business credit programs in the existing banking at BRI Syariah. KUR is a program that has the benefit of ways to reduce poverty. Factors causing poverty are government policies that raise the price of fuel oil and other basic goods, too. Poverty in Indonesia shows that most of the poor are unable to enjoy basic services such as access to drinking water, sanitation, secondary education and access to health facilities.

This research uses descriptive method with a qualitative approach. There were ten subjects in the research subjects. Data is collected by interview, observation and documentation. The location of the study was conducted at Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro and UMKM in Sugihwaras District, Bojonegoro Regency.

From the results of the study, MSMEs in the Regency. Bojonegoro which has a large number of customers, namely in Sugihwaras Subdistrict. In the KUR Program at Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro. The People's Business Credit Program (KUR) provides a very significant influence on MSMEs in the District. Sugihwaras. With the KUR program reducing poverty and unemployment. In addition, the KUR program provides benefits for the community as working capital loans and as a source of investment credit.

This relates to an increase in welfare for MSMEs in the District. Sugihwaras Regency. Bojonegoro. The People's Business Credit Program (KUR) provides capital for SMEs so they can continue to run their business without worrying about capital problems.

المستخلص

محمد رفاقي بيهقي، 2019، بحث جامعي، "تطبيق برنامج تسليف العمل للأمة شريعة في الإدارة الفرعية بوجونغورو في الشركات BRI في بنك الصغيرة والمتوسطة بمنطقة سوغيه وارس دائرة بوجونغورو"

المشرف: حسن الدين، الماجستير

شريعة في الإدارة الفرعية بوجونغورو، برنامج BRI الكلمات الرئيسية: بنك تسليف العمل للأمة

ترقية الشركات الصغيرة والمتوسطة تقدم بعض التحديات التي تحتاج إلى التنمية وتقدم على المشاركة الجيدة، بما فيها الدعم في تمويل برنامج تسليف شريعة. تسليف العمل للأمة هو البرنامج النافع BRI العمل للأمة الموجودة في بنك في تقليل الفقر. فمن العوامل لحدوث الفقر هي نظام الحكومة لزيادة النفط والحوائح الرئيسية وما إلى ذلك. ففضية الفقر في إندونيسيا تدل على أن كثرة المساكين لم يتمتعوا بالخدمة الأساسية مثل المشربة، التصحاح، التربية الابتدائية والمتوسطة، والمرافق العامة الصحية

يتم قيام هذا البحث باستخدام المنهج الوصفي بالمدخل الكيفي. فمجتمع البحث هو عشرة أشخاص. فطريقة جمع البيانات هي المقابلة، الملاحظة شريعة في الإدارة الفرعية بوجونغورو وBRI والتوثيق. فموقع البحث هو بنك والشركات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة سوغيه وارس دائرة بوجونغورو.

انطلاقاً من نتائج البحث، يبدو أن أكثر الشركات الصغيرة والمتوسطة في بوجونغورو عاملاً هي في منطقة سوغيه وارس في برنامج تسليف العمل للأمة شريعة للإدارة الفرعية بوجونغورو. فبرنامج تسليف العمل للأمة له BRI في بنك أثر بليغ لتقليل الفقر وفقدان العمل ولصلاحيات الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة سوغيه وارس. بجانب ذلك، هذا البرنامج له منافع كثيرة للمجتمع كتسليف الرأسمال للعمل ومصدر التسليف للاستثمار.

وهذا يتعلق بترقية رفاحية الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في منطقة سوغيه وارس دائرة بوجونغورو. فهذا البرنامج يتيح الرأسمال لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى هم يستطيعون أن يستمروا عملهم دون تحذير للرأسمال.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan dan pengangguran merupakan hal yang tidak bisa di pisahkan dari masalah yang ada di Indonesia, bahwasanya dalam sumber daya manusia yang ada di Indonesia masih minim sehingga penghasilan dan kebutuhan ekonomi yang mendesak bagi masyarakat Indonesia. Ini juga merupakan hal yang selalu di perhatikan oleh pemerintah, oleh karena itu upaya dalam mengurangi masalah dalam sumber daya manusia tersebut memberdayakan UMKM merupakan suatu tantangan yang harus di tingkatkan dan harus memberikan kontribusi yang baik, termasuk dukungan pembiayaan dalam progam kredit usaha rakyat yang ada di perbankan yang ada di BRI Syariah.

KUR adalah satu cara untuk mengurangi kemiskinan sebab kemiskinan merupakan masalah mutisektoral dan menjadi tanggung jawab semua pihak. Masalah kemiskinan hanya dapat di tuntaskan apabila pemerintah melakukan kebijakan yang serius dan memiliki keberpihakan kepada keluarga miskin. KUR dikenal rakyat sebagai kredit SBY karena KUR di rencanakan dalam orde pemerintahan preside Susilo Bambang Yudhoyono. Krisis ekonomi tahun 1997 mengakibatkan presentase kemiskinan melonjak 24,2 persen pada tahun 1998. (Jawa Pos: Juni 2011) Hal ini akibat kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak dunia pada saat itu sehingga barang-barang pokok yang lainnya ikut naik. Kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin tidak mampu menikmati pelayanan dasar seperti akses air minum, sanitasi, pendidikan dasar menengah dan akses fasilitas kesehatan.

Pemerintah mampu menekan angka kemiskinan melalui beberapa program pembangunan dengan membaiknya perekonomian di Indonesia terjadi para periode pemerintahan presiden Susislo Bambang Yudhoyono. Dimana pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ada salah satu program yaitu KUR pada tahun 2007 tingkat kemiskinan berhasil turun menjadi sekitar 16,58 persen dan tahun 2008 per

Maret 2008 jumlah penduduk miskin kembali turun menjadi 34,96 juta jiwa atau sekitar 15,42 persen dibandingkan angka kemiskinan per Maret 2007 bisa dikatakan jumlah penduduk miskin periode 2007-2008 mengalami penurunan sebesar 2,21 juta orang. (BPS:org2010)

Pada Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki tahun keempat bunga kredit usaha rakyat (KUR) turun dari 22% di periode presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi 7%. (Sylke Febrina Laucereno – detik Finance 2018)

Dalam penyaluran KUR dapat disalurkan secara langsung dari bank ke nasabah UMKM. Tetapi dapat juga tidak langsung dengan melibatkan kerja sama antara bank pelaksana KUR dengan lembaga keuangan lainnya seperti BPR, LKM, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan lain-lainnya. Untuk bank penyalur KUR yang banyak diinati masyarakat yaitu Bank BRI sebab mayoritas yang menjadi nasabah KUR itu masyarakat kecil dan menengah dimana pemikirannya di dominasi oleh kinerja Bank BRI serta kantor cabang bank BRI yang banyak berada di wilayah-wilayah kecil di pelosok Indonesia membuat nasabah KUR lebih memilih mengambil kredit di bank BRI.

Penyesuaian dalam pengambilan KUR sudah dijelaskan pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah dengan kerjasama antara Bank penyalur KUR. Sudah ada format cicilan yang tetap dan sudah disesuaikan dengan besarnya pinjaman dana di awal sehingga akan lebih mudah bagi Anda untuk melakukan angsuran karena sudah pasti ada proses pembayaran. Diberikan jumlah atau nominal pinjaman yang beragam sehingga kreditur bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Dengan penyesuaian tersebut tidak akan terjadi pinjaman yang beragam sehingga kreditur bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. demikian keunggulan dalam KUR di BRI Syariah. Dalam Penyaluran KUR di BRI Syariah Berbeda dengan bank BRI yang memiliki produk KUR Mikro, KUR Ritel dan KUR TKI, di bank BRI Syariah menyediakan produk KUR Mikro saja pada sektor UMKM, yaitu jumlah pinjaman maksimal Rp.25juta. Dalam perhitungan bunga di BRI Syariah memberikan sistem Murabahah yaitu jual beli yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah (*end user*) dengan margin per tahun setara dengan yang ditetapkan pemerintah sebesar

7%. Proses dalam mengajukan pengambilan program KUR sangat cepat. Program KUR hanya ada di bidang UMKM.

Tabel 1.1 Data Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Syariah KCP Bojonegoro

	Name	Plafond	OS	Open Date	UH Name	Margin	DPD
1002778027	Wawan Wahyu Sasmito	20.00	31.00.00	20/04/2015	Afroni	36.63	150
1026165438	Ahmala Fatma K.	20.00	27.00.00	24/04/2015	Afroni	0,15	146
1002506479	Sutarno	20.00	11.00	27/05/2015	Afroni	1,7	143
1025978050	Ahmin Ahsanudin	20.00	71.01.00	27/03/2016	Afroni	5,54	143
1026253175	Ridha Fathilatul	15.00	10.36.00	28/03/2016	Cipto	0,4	139
1026352536	M. Sakur	20.00	15.11.00	02/05/2016	Cipto	0,48	98
1026285851	Patlikah	20.00	13.34.00	14/08/2016	Afroni	0,42	95
1026320728	M. Ilham	20.00	14.03	16/11/2016	Cipto	0,35	93
1026320746	Rendra Sirojul A.	15.00	09.02	25/02/2017	Cipto	0,31	93
1025713143	M.Rohman	15.00	02.06	19/03/2017	Cipto	0,44	90
1026267296	Tatik Sumarti	20.00	05.34	20/06/2017	Cipto	0,1	89
1025706772	Nur Isnaini	10.00	08.42	24/07/2017	Cipto	2,33	86
1026293617	Anto Subagio	15.00	08.42	30/07/2017	Cipto	0,17	85
1026238880	Anurizal	20.00	10.12	08/08/2017	Afroni	0,16	85

(Sumber Data: Diolah rekap nasabah BRIS KCP Bojonegoro)

Setiap tahunnya anggaran yang selalu ada oleh pemerintah tersebut untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat dalam perkembangan sumber daya manusia, maka segenap potensi harus di gali, di kembangkan, dan dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam masyarakat, begitu pula seharusnya dalam segi pengetahuan dan keterampilan mampu mengalih dan mengembangkan manfaat potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pemerintah dalam pembangunan dapat terealisasi dengan baik dalam sektor UMKM yang ada di Indonesia.

Program KUR mempunyai tujuan lain yaitu penciptaan dalam lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan dalam program KUR Paket Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKM. Kebijakan pengembangan dalam pemberdayaan UMKM meliputi berbagai aspek yang mencakup dalam Peningkatan akses pada sumber pembiayaan, Pengembangan kewirausahaan, Peningkatan pasar produk UMKM dan Reformasi regulasi UMKM

Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKM melalui KUR. Presiden meluncurkan KUR, dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah. KUR adalah kredit pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

UMKM yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dapat langsung mengakses KUR di Kantor BRI Syariah Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

Tabel 1.2 Jumlah UMKM Kab. Bojonegoro

No.	Kecamatan	Jumlah UMKM
1	Balen	18
2	Baureno	23
3	Bojonegoro	40
4	Bubulan	17
5	Dander	21
6	Gondang	13
7	Kalitidu	15
8	Kanor	17
9	Kapas	18
10	Kasiman	23
11	Kedewan	26
12	Kedungadem	38
13	Kepoh Baru	14
14	Malo	18
15	Margomulyo	22
16	Ngambon	26
17	Ngasem	19
18	Ngraho	14

19	Padangan	28
20	Purwosari	20
21	Sekar	12
22	Sugihwaras	42
23	Sukosewu	16
24	Sumberjo	40
25	Tambarejo	21
26	Temayang	19
27	Trucuk	27
28	Nggayam	20
Total		627

Sumber: BPS Kabupaten Bojonegoro

Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan di implementasikan di daerah-daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat pemerintah daerah itu sendiri. Salah satu program pemerintah yaitu pembangunan perekonomian masyarakat yang di dorong adanya program promasyarakat untuk mengembangkan UMKM. Masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah di seluruh wilayah Indonesia, dari tabel di atas Sektor Wilayah Kab. Bojonegoro memperoleh hasil jumlah UMKM yaitu 627 bisa di bilang dalam segi perekonomian di Kab. Bojonegoro perkembangannya sangat baik. Dimana khususnya di kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu 3 tahun terakhir banyak nasabah KUR yang mengambil pinjaman dana pada Bank Syariah Mandiri dengan kisaran pinjaman 10 juta hingga 25 juta terkhusus di kecamatan sugihwaras.

Dari Pemerintah Kab.Bojonegoro sendiri Jumlah Kecamatan ada 28 Kecamatan, Dalam Kecamatan yang perekonomiannya yang baik dan UMKM yang banyak ialah Kec.Sugihwaras. Dalam potensi UMKM di Kec.Sugihwaras di prioritaskan pada peran pedagang di pasar dengan metode pembayaran menggunakan sistem angsuran, dalam sektor pertanian dengan metode pembayaran 6 bulan sekali atau musiman pada saat panen.

Berdasarkan Undang-Undang pada No.20 Tahun 2008 tentang UMKM dimana Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai diatur

dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai diatur oleh undang-undang ini.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tentang bagaimana mekanisme dan operasional Program KUR BRI Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Kecil UKM bagaimana keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah, bagaimana tingkat perkembangannya, bagaimana pengaruh dalam produk KUR tersebut kepada pendapatan Bank serta bagaimana prospek pembiayaan tersebut, yang difokuskan pada Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul Penelitian **IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BRI SYARIAH KCP BOJONEGORO PADA UMKM DI KECAMATAN SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang yang sudah dijelaskan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program KUR BRI Syariah KCP Bojonegoro pada UMKM di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana peran program KUR BRI Syariah KCP Bojonegoro terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan pada masyarakat umum dan para akademisi untuk lebih mengenal tentang Implementasi Progam KUR BRI Syariah KCP Bojonegoro Dalam Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Lebih khusunya penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui tentang Implementasi Progam Usaha Rakyat (KUR) BRI Syariah KCP Bojonegoro dalam peningkatan perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) DI Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui pengaruh progam KUR BRI Syariah KCP Bojonegoro terhadap peningkatan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Permasalahan ekonomi tidak hanya meliputi masalah-masalah mikro seperti ketentuan dalam harga, monopoli dan eskternalitas yang memerlukan intervensi pemerintah. Permasalahan ekonomi juga terjadi dalam lingkup ekonomi makro yang memerlukan kebijakan pemerintah yaitu salah satunya kebijakan pemerintah yaitu dengan adanya KUR yang di atur dalam PERMENKO N0.11 TAHUN 2017 dimana penerima KUR adalah individu atau perseorangan baik sendiri-sendiri maupun kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif. Di Indonesia dengan berbagai karakter suku bangsa yang berbeda-beda, tingkat pendidikan dan latar belakang budaya serta lingkungan alam yang berbeda-beda pula, peranan pemerintah menjadi mutlak diperlukan. Tanpa campur tangan pemerintah akan secara otomatis terjadi monopoli diberbagai bidang. Dengan aturan yang beragam saja masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran ekonomi yang merugikan masyarakat luas, apalagi apabila pemerintah lepas tangan dan tidak turut serta mengendalikan ekonomi. Maka dari itu dengan masalah yang terjadi tersebut pemerintah dengan kekuasaanya mengadakan kebijakan tentang KUR untuk mendorong kemajuan perekonomian usaha kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Indonesia.(Sumber:<https://kur.ekon.go.id>) Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mendasari adanya penelitian ini diantaranya sebagai berikut yang akan disajikan dalam bentuk table dibawah ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian Atau Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Aditya Wardana dan Cut Irna Setiawati (2015) Analisis Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Indonesia November 2012-April 2014	Kredit Usaha Rakyat (KUR), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Koperasi, Sektor Strategis.	Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan yang dilakukan dalam kajian.	Hasil dari analisis kajian percepatan perluasan penyaluran KUR di tingkat provinsi Jawa Tengah didapatkan beberapa hasil..Belum optimalnya sinergitas antar lembaga terkait dalam program KUR baik horizontal maupun vertical seperti dengan perbankan. Belum maksimalnya penggunaan database penyaluran KUR
Syamsuddin (2016) Analisis pemberian kredit usaha rakyat (KUR) Bank BRI terhadap kinerja Usaha Kecil Di Kota Makassar	Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kinerja dan Usaha Kecil. Mengetahui jumlah penerimaan KUR terhadap UKM dan Menganalisis pengaruh pemberian KUR terhadap kinerja UKM	Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif dengan menggunakan analisis regresi sederhana Uji T (Uji Parsial) serta dengan menggunakan Koefisien Determinan (R ²)	Hasil penelitian dari analisis tentang pengaruh kredit rakyat (KUR) terhadap kinerja usaha kecil di kota. Dengan adanya program bantuan kredit rakyat (KUR) bagi pengusaha usaha mikro dan kecil (UMK) maka terjadi peningkatan pendapatan serta kesempatan kerja bagi pengusaha usaha mikro dan kecil (UMK) di kota Makassar.

<p>Muhammad Gobel (2016) implementasi kebijakan kredit usaha rakyat di Bank Rakyat Indonesia Unit Bahu Manado</p>	<p>Variabel yang digunakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kredit usaha rakyat (KUR) dan Bank penyalur yaitu Bank BRI</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan kualitatif, deskriptif dimana dengan menganalisis aspek komunikasi yang baik antara subjek yang terlibat dalam kegiatan kur.</p>	<p>Hasil penelitian yaitu menggambarkan implementasi kebijakan KUR mikro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Bahu dilihat/dikaji dari empat faktor penting dalam implementasi kebijakan publik diantaranya komponen faktor komunikasi, sumberdaya disposisi dan struktur organisasi atau biokrasi.</p>
<p>Koesrianti (2016) Law Reform Of Small And Medium Enterprises (Smes) And Equitable Cooperative For Competitiveness Improvement In AEC Era</p>	<p>Cooperative, AEC, Legal Reform and SMEs</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini untuk UMKM belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam menghadapi liberalisasi perdagangan bebas masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dan globalisasi ekonomi dunia.</p>
<p>Masrudin, Rahayu Indriasari, and Jurana (2017) Implementation of Telkom company partnership program in the SME Empowerment framework</p>	<p>Partnership Program, SME Empowerment, Telkom Company Palu</p>	<p>Metode penelitian survey dan alat analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Populasi penelitian adalah UKM yang menjalankan bisnis kegiatan di Kabupaten Cirebon.</p>	<p>Program yang dilakukan oleh perusahaan Telkom dalam rangka memberdayakan UKM (usaha kecil menengah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PT. program kemitraan beberapa orang yang mengetahui program tersebut terasa terbantu.</p>

<p>Diah Setyorini Gunawan, Neni Widayaningsih, Barokatuminalloh (2017) The Strategy Development of SME's Metal</p>	<p>SMEs, Performance, Banking Credit, SMEs Predictors, SMEs Development Strategy</p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis diskriminan.</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan jumlah produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah prediktor yang membedakan pencapaian pendapatan antara kelompok pekerja logam unggul dan kelompok pekerja logam non unggul.</p>
<p>Y. Munandar (2017) The effectivity of credit for businesses program (KUR) distribution in Maluku and Maluku utara provinces in periode of 2010-2014</p>	<p>Credit for business, economic development, productive sector, poverty, working capital</p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan teori efektivitas penyaluran KUR dalam periode 2010-2014 di provinsi Maluku dan provinsi Maluku Utara.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tren efektifitas penyaluran KUR periode 2010-2014 di provinsi Maluku menurun dimana rasio salah sasaran penyaluran KUR di tahun 2014 sebesar 1,57% KUR di tahun 2010 yang sebesar 0,00% dan tren efektifitas penyaluran KUR periode 2010-2014 di provinsi Maluku Utara meningkat.</p>
<p>Kristina Sedyastuti (2018) Analisis pemberdayaan UMKM dan peningkatan daya saing dalam kancah pasar global</p>	<p>Usaha mikro kecil dan menengah, Strategi, Pemberdayaan dan daya saing</p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan menganalisis pemberdayaan UMKM dan meningkatkan daya</p>	<p>Pemberdayaan UMKM ditengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM mampu bersaing dengan persaingan global.</p>

Yanah, Hamlah Nakhwatunnisa, Tri Amalia Sukarno (2018) Strategy to Increase the Competitiveness of SME's Enterprises	Perpetrators of SME's, Competitiveness, ASEAN economics	Metode penelitian survey dan alat analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Populasi penelitian adalah UKM yang menjalankan bisnis kegiatan di Kabupaten Cirebon.	Hasil penelitian mencatat dana itu variabel, pelatihan kewirausahaan, bantuan bisnis dan kemitraan berpengaruh pada daya saing dalam menghadapi ASEAN ekonomi.
--	---	---	--

Sumber : Diolah dari jurnal penelitian terdahulu

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat memperoleh hasil yang baik dan mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan public maka terdapat dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu yakni menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai upaya dalam pemberdayaan masyarakatnya agar dapat bersaing dalam dunia perekonomian yang akan mendatang.

Winarno (2002:101) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai alat administrasi dimana sebagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang di inginkan. Sedangkan Nugroho (2003:153) memberikan dan menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan beberapa model dari implementasi kebijakan. Model-model

tersebut dipaparkan oleh beberapa tokoh yang berpengaruh dalam disiplin ilmu kebijakan public. Berikut model-model tersebut yang dipaparkan oleh Nugroho (2003:167) dimana model yang paling klasik yakni model yang diperkenalkan oleh Dional Van Meter dan Carl Van Hom pada tahun 1975, dimana model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan public, implementator dan kinerja kebijakan public. Menurut mereka terdapat empat varian yaitu diantaranya: aktivitas yang mendasar dalam implementasi dan komunikasi antar organisasi, untuk karakteristik dari agen pelaksana atau implementator, kondisi ekonomi social dan politik serta kecenderungan dari pelaksana.

Implementator Keberhasilan dalam implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri sesuai dengan ciri-ciri konsep keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle, Implementability sendiri disini dimaksudnya sesuai dengan ciri-ciri menurut Merile S. Grindle yaitu yang terdiri dari:

1. *Content of policy* menurut Merilee S. Grindle dalam Nugroho (2003:176) adalah
 - a. *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi) indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
 - b. *Type of Benefit* (tipe manfaat) dimana untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
 - c. *Extent of change of envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai) setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai, seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
 - d. *Site of decision making* (letak dalam pengambilan keputusan) dimana pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan

penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.

- e. Program *implementer* (pelaksana program) dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata dan terpapar dengan baik.
 - f. Resources committed (sumber-sumber yang digunakan) pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
2. *Context of policy* menurut Grindle dalam Nugroho (2003:177) adalah :
- a. *Power, interest and strategy of actor involved* (kekuasaan kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat). Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaannya suatu implementasi kebijakan.
 - b. *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan *regime* yang berkuasa). Lingkungan yang dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristiknya dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
 - c. *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kebutuhan dan respon dari para pelaksana maka hendak dijelaskan untuk menganggapi suatu kebijakan.

Setelah pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang

diharapkan juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan dapat terjadi.

2.2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Syariah

KUR adalah skema pembiayaan atau kredit modal kerja atau investasi yang khusus di peruntukkan bagi usaha mikro kecil menengah UMKM di bidang usaha produktif yang usahanya layak *feasible* namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan. Dimana KUR merupakan kredit modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu atau perorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak, belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Berdirinya bank syariah di Indonesia dengan harapan segala bentuk praktek yang dilakukan oleh bank harus sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan Al-quran dan Al-Hadist yang segala bentuk kegiatan dan transaksi tidak ada unsur riba didalamnya. Riba merupakan permasalahan penting dalam ekonomi Islam, karena jelas dilarang oleh agama. Sama seperti bank lainnya, bank syariah menawarkan berbagai bentuk pelayanan untuk memudahkan nasabahnya dalam bertransaksi. Salah satu bentuk pembiayaan yang diberikan Bank BRI Syariah adalah adanya produk pembiayaan mikro yaitu KUR. Bank BRI Syariah merupakan satu-satunya lembaga keuangan syariah yang memiliki izin dalam pengeluaran produk berbasis KUR

PT. Bank BRI Syariah terbentuk berawal dari proses akuisisi oleh PT. Bank BRI Syariah terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007, setelah proses akuisisi dan mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya, 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka sebulan setelah izin yang diberikan pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Setelah sekian lama beroperasi kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Kehadiran PT. Bank BRI Syariah dalam industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan

masyarakat terhadap sebuah bank modern agar mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan *brand* PT. Bank BRI Syariah. Sumber: <https://brisyariah-izinkur.co.id>

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank BRI Syariah untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

PT. Bank BRI Syariah menjadi BRI Syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah ke bawah. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank BRI Syariah dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank BRI Syariah sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah. Bank BRI Syariah merupakan lembaga keuangan yang merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk transaksi gadai emas syariah yang beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan pembiayaan yang sangat pesat dalam layanan gadai emas syariah untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek nasabah. Di antaranya meliputi dalam segi pendidikan, kesehatan, modal usaha dan lain-lain. Sumber: <https://keuangan.kontan.co.id>

Tujuan program KUR adalah mengembangkan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengetasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah

- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan koperasi kepada lembaga keuangan
- c. Sebagai upaya penanggulangan atau pengetasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Kebijakan mengenai KUR diatur oleh PERMENKO NO.11 TAHUN 2017 dengan ketentuan umum mengenai KUR di mana penerima KUR merupakan individu atau perseorangan baik sendiri-sendiri maupun kelompok usaha atau badan usaha yang melaukan usaha yang produktif. Sumber dana 100% dari dana lembaga keuangan penyalur KUR dengan suku bunga KUR pada tahun 2018 sebesar 7% efektif pertahun (atau sama dengan suku Bunga flat yang setara).
Sumber:<https://djpbk.kemenku.go.id>

Beberapa ketentuan yang diprasyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut :

1. UMKM yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui sistem informasi debitur (SID) pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan dan atau belum pernah memperoleh fasilitas kredit program dari pemerintah.
 - b. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal nota kesepakatan bersama (MoU) penjaminan KUR dan sebelum addendum I maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.
 - c. KUR yang diperjanjikan antara Bank pelaksana dengan UMKM yang bersangkutan.
2. KUR disalurkan kepada UMKM untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan :

- a. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tingkat suku bunga kredit pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% efektif pertahun
- b. Untuk kredit di atas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tingkat suku bunga kredit pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar 16% efektif pertahun.
- c. Bank pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkereditan yang sehat serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Program KUR. Seperti dikatakan Muliaman, proses pencarian tersebut dilakukan dengan mengkaji realitas dan implementasi KUR di lapangan selama ini. Adapun KUR adalah program pinjaman bersubsidi terbesar untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di negara-negara berkembang yang telah dibentuk pemerintah sejak 2007 lalu. KUR sendiri sempat didesain ulang pada 2015, dengan lebih menekankan pada penyediaan tingkat bunga bersubsidi bagi UMKM. OJK tentu saja pantau implementasinya, dan juga dampak persaingan dengan bank-bank yang tidak memiliki KUR. Tapi intinya, ini nanti akan jadi masukan. Saya kira kan ini juga belum selesai untuk model-modelnya apabila kita ingin mendorong ke sektor produktif. Sumber: <https://ojkumkm.co.id>

Bank BRI Syariah menjadi bank pelaksana dari pembiayaan KUR yang dimana program tersebut dibuat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. KUR yang dilaksanakan di Bank BRI Syariah ini merupakan KUR Mikro iB yang batas plafon pembiayaannya sampai dengan 25.000.000. Pembiayaan KUR ini menggunakan akad Murabahah dan ditambahkan dengan Wakalah didalamnya. Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya, pertama untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan KUR antara pemerintah dengan Bank BRI Syariah, kedua untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan KUR yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah kepada nasabah, dan yang ketiga untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan KUR yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah. Penelitian ini bertolak

dari pemikiran bahwa dalam setiap melakukan kegiatan pinjam meminjam yang menghasilkan kegiatan jual beli dan melibatkan bank syariah dengan nasabah atau kegiatan muamalah yang menggunakan akad murabahah diharuskan terpenuhinya rukun dan syarat, serta pelaksanaannya agar sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 fiqih muamalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk penelitian yang memaparkan atau menggambarkan keadaan suatu objek penelitian, yang kemudian dilakukan analisis secara utuh mengenai fakta-fakta fenomena objek yang diteliti yang pada akhirnya ditarik kesimpulan. Adapun teknis pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran KUR yang dilakukan antara pemerintah dengan Bank BRI Syariah sangat berkesinambungan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Menteri Perekonomian. Mekanisme penyaluran KUR dari Bank BRI Syariah kepada nasabah dilakukan melalui beberapa tahapan. Dan pada pelaksanaan pembiayaan dalam KUR yang ditinjau dari fiqh muamalah telah tepat dalam pelaksanaannya karena terpenuhinya rukun dan syarat dari akad yang digunakan. Sementara pembiayaan KUR ditinjau dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah serta Kompilasi. Sumber:<https://dsnmui.or.id>

2.2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UU No.20 Tahun 2008 UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria di mana usaha mikro diatur dalam undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dalam undang-undang. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi riil masyarakat Indonesia yang terbukti mampu bertahan dari krisis ekonomi. Di samping itu, UMKM dan koperasi yang bergerak pada berbagai sektor strategis seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan perindustrian harus diberikan prioritas perhatian oleh pemerintah, mengingat sektor tersebut sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam rangka membantu permodalan dan memberdayakan para pelaku usaha di sektor-sektor tersebut pemerintah telah meluncurkan program kredit yang dapat meningkatkan akses ke perbankan dengan skema penjaminan kredit.

Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa perang strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain jumlahnya yang besar dan setiap sektor ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau. Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain UMKM masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan serta kemitraan. Sumber: <https://finansialumkm.bisnis.com>

2.3 Kerangka Berfikir

Pokok pembahasan dalam penelitian ini mengenai implementasi program KUR untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Dengan demikian diambil kerangka berfikir dalam penelitian ini menggambarkan alur pemikiran peneliti

berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan. Peneliti menemukan beberapa masalah yang dapat menghambat pelaksanaan program KUR seperti di antaranya sebagai berikut :

1. Kebijakan program KUR tidak tepat sasaran, program, KUR yang merupakan program pemerintah yang dikhususkan bagi pelaku usaha kecil dan mikro justru dinikmati oleh mereka yang ternyata mampu melakukan pinjaman tanpa perlu jaminan dari pemerintah.
2. Minimnya sosialisasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh Bank pelaksana.
3. Rendahnya partisipasi dalam program KUR, karena adanya ketakutan akan suku bunga yang ada di bank, serta ada anggapan dari masyarakat bahwa jika berurusan dengan Bank pasti melibatkan jaminan sementara mayoritas warga tidak memiliki jaminan selain usaha yang dijalankan.

Teori implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model teori implementasi yang dipaparkan oleh Merilee S Griendle (1980). Model ini memaparkan bahwa, implementasi kebijakan ditentukan oleh 2 faktor yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasinya (*context of policy*). Ide dasarnya dari teori ini adalah bahwa setelah kebijakannya di laksanakan maka kebijakan bias dilihat keberhasilannya yang ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Khususnya ada penelitian ini yang mengaju pada implementasi KUR di mana program ini merupakan program pemerintah yang dicanangkan untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah sudah tepat sasaran sesuai harapan yang di harapkan pemerintah atau belum. Adapun isi kebijakannya mencakup:

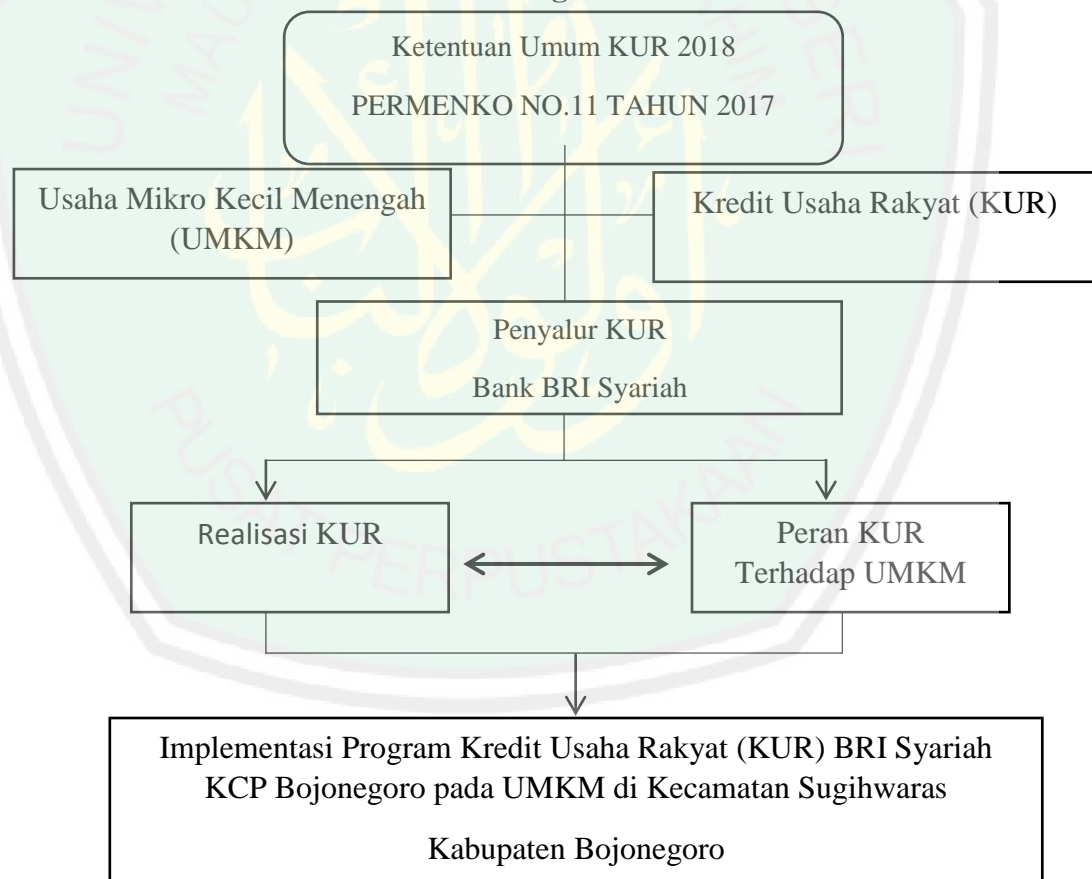
1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan di hasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Siapa pelaku program
6. Sumberdaya yang dikerahkan

Dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh *context of policy* yang mencakup beberapa aspek di antaranya sebagai berikut :

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Berdasarkan teori Merilee S.Grindle ini, kita dapat mengetahui apakah Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro sudah berjalan optimal atau belum. Maka untuk mempermudah memahami alur berfikir peneliti menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut

Tabel 2.2 Kerangka Penelitian



Berdasarkan dalam kerangka berfikir diatas yang merupakan alur berpikir, pemerintah mulai mencanangkan program KUR pada tahun 2007 sebagai respon

atas Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta ketentuan umum KUR 2018 oleh PERMENKO NO.11 Tahun 2017. Impres tersebut ditindak lanjuti dengan ditanda tangannya nota pemerintahan, dalam lembaga penjaminan dan perbankan tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan koperasi atau yang lebih populer dengan istilah Program KUR. Dengan tujuan adanya KUR dikehendaki meberikan peran terhadap perkembang UMKM di Indonesia untuk memeberikan kemudahan pemberian kredit kepada UMKM khususnya di sektor produksi.

BRI Syariah KCP Bojonegoro mengeluarkan program KUR kemudian program ini akan di salurkan kepada pengusaha mikro kecil (UMK) yang membutuhkan dan tambahan atau pinjaman untuk usaha mereka. Setelah program berjalan pihak bank memastikan program telah berjalan secara produktif dan efektif sehingga tercapainya target penyaluran dalam program KUR. Mengenai perkembangan KUR sektor produktif yang lebih banyak menerima program kredit usaha rakyat ada pada sektor perdagangan.

implementasi dalam penyaluran KUR dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja usaha mikro kecil dapat diukur menggunakan lima aspek yaitu aspek ketetapan sasaran, aspek ketepatan waktu, aspek ketepatan jumlah uang yang diterima oleh nasabah, aspek ketepatan beban kredit dan aspek ketepatan prosedur. Setelah itu dilihat bagaimana dampak dari adanya KUR bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Sumber: <https://brisyariah.co.id>

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan dengan menggunakan pendekatan survei dan eksplorasi. Analisis data menggunakan metode Kualitatif. Data primer diperoleh melalui terjun langsung ke lapangan mengamati subjek yang diteliti dan mendeskripsikan data yang diperoleh. Metode kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dikatakan demikian sebab penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan suatu fenomena dengan cara menyelidiki suatu proses, menemukan makna, serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam baik individu, kelompok, maupun kondisi situasi yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan adanya program KUR BRI Syariah KCP Bojonegoro dalam meningkatkan kesejahteraan usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. yang memang adanya program KUR di peruntungkan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah agar bias bersaing pada zaman sekarang dan selanjutnya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti akan melaksanakan penelitian. Wilayah yang akan dijadikan lokasi penelitian terkait dengan permasalahan yang diangkat berada di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Kepala divisi kebijakan dan pengembangan bisnis mikro BRI dalam mengimplementasikan program KUR khususnya di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro
2. Peneliti ingin mengetahui mekanisme proses di lapangan, hasil-hasil dari implementasi program KUR dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

3. Peneliti secara langsung melihat dinamika adanya KUR dalam pengembangan usaha kecil dan menengah
4. Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia yang bisa digunakan sebagai basis pengembangan ekonomi lokal khususnya pengembangan usaha kecil dan menengah.

3.3 Subjek Penelitian

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka peneliti bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan, karena penelitian berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data dan mengumpulkan informasi dari hasil penelitian.

Tujuan kehadiran peneliti di lapangan adalah untuk mengamati secara langsung untuk mengetahui keadaan atau kegiatan apa saja yang sedang berlangsung di lapangan, fenomena-fenomena sosial dan gejala-gejala psikis yang terjadi di lapangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengamati langsung apakah kejadian-kejadian tersebut berbeda jauh atau relevan dengan hasil-hasil yang diperoleh dari wawancara. Peneliti berperan sebagai pengamat partisipan.

3.4 Data Dan Jenis Data

3.4.1 Data Primer

Data yang merupakan data yang diambil dari subjek langsung dan bukan dari orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari responden yang ada di lapangan melalui observasi dan wawancara. Data primer melalui observasi, penelitian dapat memperoleh data mengenai kondisi yang berkaitan dengan aspek yang akan diteliti. Sedangkan data primer melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh data dengan melakukan wawancara kepada responden yang terkait.

Responden dalam penelitian ini akan dipilih berdasarkan teknik purpose sampling atau teknik pengumpulan sampel yang bertujuan agar data yang

diperoleh nantinya lebih representative dan focus pada tujuan penelitian. Berikut responden yang dipilih antara lain:

1. Kepala di visi kebijakan dan pengembang KUR BRI Syariah KCP Kabupaten Bojonegoro dengan jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan dana KUR diwilayahnya masing-masing.
2. Nasabah KUR dalam pengembangan bisnisnya.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan peneliti bertindak sebagai pemakai data. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder tersebut umumnya berupa arsip, laporan tertulis atau dokumentasi maupun data hasil publikasi.

3.4.3 Penentuan Informan

Menurut pendapat Spradley dalam Faisal (1990:45) informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu :

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan nasabah yang mengambil KUR di BRI Syariah KCP Bojonegoro lebih khususnya nasabah di

kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ” Implementasi Program KUR Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro”. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Metode pengamatan (observasi) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku,kegiatan,benda-benda, waktu,peristiwa, tujuan dan perasaan (Patalima Hamid,2010:60).Teknik observasi yang digunakan peneliti adalah observasi partisipatif pasif, yakni peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Peneliti akan melaksanakan observasi dengan melihat kondisi dan kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana dari KUR alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan data secara realitis perilaku, kejadian dan kegiatan-kegiatan yang ada.

2. Wawancara

Metode wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan, Pertama, dengan wawancara peneliti dapat menggali langsung apa yang dialami subjek dan Kedua dengan wawancara ke adaan subjek hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau,masa sekarang dan masa yang akan datang (Patalima Hamid,2010:60). Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, di mana peneliti telah merumuskan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu dan informasi diharapkan menjawab dalam hal-hal kerangka wawancara dan definisi atau ketentuan dari masalah. Sumber informasi selama

pelaksanaan penelitian ini adalah Kepala devisi kebijakan dan pengembangan program KUR dan nasabah yang menjalin kerja sama dengan program KUR.

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, gambar atau karya-karya monumental. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Data dokumentasi bisa berupa data-data sekunder baik berupa buku referensi, dokumen, data struktur organisasi, laporan-laporan dan foto-foto pada saat pelaksanaan program.

Secara Umum tahap-tahap penelitian terdiri dari :

1. Tahap Pra Lapangan

a. Menyusun rancangan penelitian

Dalam tahap menyusun rancangan penelitian ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan di antaranya adalah: menemukan tema dan lokasi penelitian. Menyusun latar belakang dan rumusan masalah, menyusun dan menelusuri teori yang berkaitan dengan tema penelitian, menyusun metode penelitian yang meliputi penentuan kebutuhan data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data.

b. Mengurus perizinan penelitian

Proses pengurusan ijin penelitian dimulai dari permintaan ijin sebelum melakukan penelitian kepada pihak pemerintahan desa di BRI Syariah KCP Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya setelah mendapatkan ijin secara lisan dari pihak pemerintah desa, peneliti mengurus perijinan tertulis dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yakni Fakultas Ekonomi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

c. Menjajaki dan menilai lokasi penelitian

Dalam menjajaki dan menilai lokasi penelitian akan berupaya memahami kondisi dan situasi wilayah penelitian, penelitian berupaya mencari informasi-informasi dasar tentang objek dan subjek penelitian. Hal ini sangat diperlukan agar peneliti mendapat gambaran sebelum turun ke lapangan untuk melakukan penelitian.

d. Menemukan Informasi penelitian

Penentuan informasi akan ditentukan setelah penelitian dapat memfokuskan masalah dan menentukan informasi yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini.

e. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Penelitian menyiapkan daftar pertanyaan kepada sasaran program, pemerintah desa dan instansi terkait. Serta menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian seperti pulpen, kamera, *handycam*, serta alat perekaman.

2. Tahap Pekerja Lapang

Pada tahap ini peneliti melaksanakan kegiatan memasuki lapangan untuk melakukan penelitian. Kegiatan ini merupakan kegiatan di mana peneliti akan mengadakan proses dalam pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta pemilihan dokumen sekunder yang terkait dengan kebijakan KUR.

Pada tahap pekerjaan lapangan peneliti tidak hanya dituntut melakukan proses pengumpulan data tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat. Setelah itu, peneliti melakukan analisis data yang akan dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan peneliti di antaranya adalah mereduksi data, menyajikan data kemudian menarik kesimpulan.

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting bisa dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Prosedur analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono,2013) meliputi :

1. Mereduksi Data

Data yang telah terkumpul tersebut dibaca, di pelajari dan ditelaah secara mendalam kemudian direduksikan ke dalam tiga tahap yaitu Pengorganisasian, pemberian kode dan mencari penjelasan-penjelasan alternatif. Tiga tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengorganisasian data

Pengorganisasian data dimaksudkan untuk memisahkan data yang terkumpul dari semua informan dan menyusun kembali menjadi satuan-satuan kecil yang sesuai dengan tema yang dikaji.

b. Pemberian kode

Setelah data dipisahkan menjadi satuan topik yang lebih kecil, maka langkah berikutnya ialah pemberian kode. Pemberian kode dimaksudkan untuk memudahkan dalam melakukan pemaparan data.

c. Mencari Penjelasan Alternatif

Pada tahap ini, penelitian mencari penjelasan-penjelasan yang logis guna menjelaskan keterkaitan antara data tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku kepustakaan dan penelitian sebelumnya serta mencari informasi melalui internet yang relevan dengan masalah yang dikaji.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu upaya menampilkan data secara jelas dan mudah dipahami bagi siapa saja yang membacanya dalam bentuk naratif, table, grafik atau perwujudan lainnya yang dapat memberikan gambaran jelas mengenai proses dan hasil tindakan yang telah dilakukan.

3. Menarik Kesimpulan

Penyimpulan hasil analisis data merupakan kegiatan inti sari dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari pola, metode, tema, hubungan dan sebagainya dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat singkat dan bermakna.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Syariah

PT. Bank BRI Syariah terbentuk berawal dari proses akuisisi oleh PT. Bank BRI Syariah terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007, setelah proses akuisisi dan mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya, 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka sebulan setelah izin yang diberikan pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Setelah sekian lama beroperasi kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Kehadiran PT. Bank BRI Syariah dalam industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern agar mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank BRI Syariah.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank BRI Syariah untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

PT. Bank BRI Syariah menjadi BRI Syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah kebawah. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank BRI Syariah dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank BRI Syariah sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana

masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah. Bank BRI Syariah merupakan lembaga keuangan yang merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk transaksi gadai emas syariah yang beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan pembiayaan yang sangat pesat dalam layanan gadai emas syariah untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek nasabah. Diantaranya meliputi dalam segi pendidikan, kesehatan, modal usaha dan lain-lain.

BRI Syariah menawarkan kredit usaha rakyat dengan suku bunga rendah. Seperti yang telah kita ketahui, BRI Syariah telah menjadi Bank berbasis Syariah pertama yang mendapatkan izin untuk menyalurkan KUR. Melalui produk pembiayaan mikronya membantu para nasabah dengan cara memberikan pinjaman sebagai modal usaha untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha baru. Nasabah dapat mengajukan pinjaman di BRI Syariah mulai dari Rp 25 juta hingga Rp 500 juta. BRI Syariah menawarkan kredit usaha rakyat dengan suku bunga rendah. Seperti yang telah kita ketahui, BRI Syariah telah menjadi Bank berbasis Syariah pertama yang mendapatkan izin untuk menyalurkan KUR. Melalui produk pembiayaan mikronya membantu para nasabah dengan cara memberikan pinjaman sebagai modal usaha untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha baru. Nasabah dapat mengajukan pinjaman di BRI Syariah mulai dari Rp 25 juta hingga Rp 500 juta. Sumber: <https://brisyariah.co.id>

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian bab pendahuluan di muka bahwa kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikururkan oleh pemerintah pada November 2007. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan KURD adalah : (1) UU.No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan UU.No.10 Tahun 1998; (2) UU.No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; (3) UU.No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; (4) UU.No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; (5) UU.No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, (6) Keputusan Presiden No.14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015. Sumber: <https://kemkokur.com>

Kebijakan pelaksanaan KUR sejak tahun 2015 dan seterusnya diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pokok-pokok kebijakan KUR yang ditetapkan dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015, antara lain adalah sebagai berikut :

- (1) KUR Mikro adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha sector pertanian, perikanan, industry pengolahan, dan perdagangan yang terkait, yang produktif dan layak namun belum memenuhi persyaratan agunan tambahan bank pelaksana dengan plafon kredit sampai dengan Rp.25 juta yang dijamin oleh perusahaan penjamin.
- (2) Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta.
- (3) KUR Mikro diberikan kepada yang memenuhi persyaratan, antara lain yaitu :
 - a. Calon debitur mempunyai usaha produktif dan layak namun tidak memiliki agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan oleh Bank pelaksana;
 - b. Calon debitur dapat sedang menerima kredit/pembiayaan, seperti Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, serta KUR Mikro dengan kolektabilitas lancar;
 - c. Calon debitur memiliki surat izin usaha mikro dan kecil (IUMK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat dan atau surat izin lainnya;
 - d. Calon debitur yang sedang menerima KUR Mikro diperbolehkan mendapatkan fasilitas tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp.25 juta;

- e. Setiap debitur hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp.75 juta per debitur dari Bank pelaksana KUR.

(4) Agunan KUR Mikro :

- a. Agunan Pokok, yaitu kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai.
- b. Agunan tambahan sesuai penilaian dari Bank Pelaksana KUR Mikro namun tanpa perikatan.

(5) Jangka waktu KUR Mikro maksimal 2 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan 4 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

(6) Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan dapat diberikan kepada debitur yang usahanya meningkat atau memerlukan tambahan kredit/pembiayaan tanpa menunggu pinjaman yang bersangkutan dilunasi, dengan ketentuan total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp.75 juta.

(7) Sektor yang dibiayai KUR Mikro, adalah :

- a. Seluruh bidang usaha mikro sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- b. Seluruh bidang usaha mikro di sector perikanan, termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- c. Seluruh bidang usaha mikro sektor industri pengolahan, termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fesyen, film, animasi, video dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan.
- d. Seluruh bidang usaha mikro di sektor perdagangan, termasuk kuliner dan pedagang eceran.

Dalam suatu lembaga pembiayaan pasti ada struktur organisasi yang mengatur jalannya suatu kebijakan. Kebijakan itu dapat berjalan sesuai dengan prosedur ketika ada yang mengendalikan. Begitu pun di BRI Syariah memiliki karyawan yang menduduki posisi tertentu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Berikut ini penjelasan untuk posisi masing-masing karyawan yang bekerja di Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro.

a. Pemimpin cabang

Adalah struktur tertinggi dikantor cabang yang bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan ritel dilevel kantor cabang dan membawahi keseluruhan manager, baik bisnis maupun operasional. Adapun tugas dari pemimpin cabang adalah :

- 1) Melakukan pertanggungjawaban operasional dan financial di kantor cabang
- 2) Melaksanakan misi kantor cabang pembantu secara keseluruhan
- 3) Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur
- 4) Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, serta mengelola layanan unggul
- 5) kepada nasabah
- 6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kegiatannya.

b. Branch Quality Assurance

- 1) Membantu pimpinan mengendalikan / mengawasi proses kegiatan harian.
- 2) Mengelola seluruh buku pedoman pekerjaan.
- 3) Mendistribusikan surat masuk yang berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan suatu transaksi / aktivitas perbankan.
- 4) Melakukan pemeriksaan keuangan.

c. Financing Risk Manager

Mengawasi pemakaian program / sistem/ prosedur manajemen resiko yang berhubungan dengan operasional perbankan di kantor cabang.

d. Mikro Marketing Manager

- 1) Menyetujui proses pembiayaan Rp.5.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-
- 2) Merencanakan dan memastikan pencapaian target bisnis di UMS sesuai budget yang ditetapkan.
- 3) Memastikan Sustainable Growth dan Sales performance.
- 4) Melakukan monitor berkala terhadap kualitas pembiayaan dan proses maintenance nasabah.
- 5) Meminimilisaai resiko financing risk dan operation risk.

e. **SME (*Small Medium Enterprise*) & *Commercial Marketing Manager***

Bertanggung jawab atas program-program marketing untuk segmen bisnis small medium dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari sisi bisnis maupun administrasinya.

f. ***Financing Reviewer***

Melakukan review pembiayaan, mencermati setiap pengajuan pembiayaan yang melebihi kewenangan limit cabang untuk memutuskan, untuk kemudian diajukan ke komite kantor pusat.

g. ***Account Officer Mikro***

- 1) Mencapai target sales produk pembiayaan mikro yang ditetapkan.
- 2) Melakukan proses pemasaran produk mikro Bank Rakyat Indonesia Syariah
- 3) Verifikasi awal calon nasabah dan memastikan kelengkapan persyaratan dokumen pembiayaan
- 4) Menjalankan sales proses dengan disiplin tinggi.

h. ***Collection Manager***

- 1) Melakukan collection atas tunggakan pembiayaan yang bermasalah
- 2) Melaksanakan disiplin proses collection / penagihan
- 3) Membuat usulan dan mereview permohonan restrukturisasi nasabah
- 4) Melakukan recovery terhadap pembiayaan nasabah yang telah dihapus buku
- 5) Melakukan pengelolaan dan penjualan terhadap asset yang dikuasai bank
- 6) Melakukan proses litigasi terhadap nasabah yang tidak kooperatif
- 7) Melaksanakan audit rating dengan baik dan tidak ada froud

i. ***Area Financing Officer (AFO)***

- 1) Melakukan pre screening dan pemeriksaan kelengkapan berkas aplikasi permohonan pembiayaan mikro yang diajukan SO dan registrasi terhadap berkas aplikasi permohonan pembiayaan mikro tersebut.
- 2) Melakukan proses permohonan BI Checking ke Financing Support dan melampirkan dokumen hasil BI Checking pada berkas aplikasi permohonan pembiayaan mikro.
- 3) Membuat akad pembiayaan, pengikatan jaminan dan surat – surat yang dibutuhkan dalam proses pembiayaan mikro

- 4) Memastikan kelengkapan dokumen pembiayaan sesuai dengan DCL dan ketentuan sebelum mengirim ke financing support untuk proses realisasi.
- 5) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan cash pick up
- 6) Filling dokumen – dokumen.

j. Appraisal and Investigation

- 1) Memeriksa kelengkapan dokumen agunan yang akan dilakukan peninjauan.
- 2) Membuat jadwal peninjauan penilaian agunan dan berkoordinasi dengan AO.
- 3) Melakukan peninjauan, pemeriksaan, dan penilaian fisik agunan sesuai dengan ketentuan yg berlaku serta mencocokkan dengan bukti – bukti dokumen agunan.
- 4) Melakukan koordinasi reaprasial dengan AO.
- 5) Membuat laporan hasil penilaian agunan dan penilaian kembali agunan.

k. Operation and Service Manager

- 1) Menyusun rencana penempatan dan pembinaan karyawan operasional cabang.
- 2) Menjaga kebersihan lingkungan kerja dan mengkoordinasi persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kebersihan operasional cabang.
- 3) Mengelola operasi cabang.
- 4) Melakukan koordinasi internal dan eksternal perusahaan khususnya yang terkait dengan operasional.
- 5) Melakukan sosialisasi kepada karyawan di jajaran operasional dan pihak terkait lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasional di cabang.

l. Branch Operasional Supervisor

- 1) Membina dan melatih teller dan customer service agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.
- 2) Mengelola operasional front office kantor cabang.
- 3) Melakukan koordinasi internal dan eksternal perusahaan khususnya yang terkait dengan operasional front office kanca.

- 4) Melakukan sosialisasi kepada teller dan customer service serta pihak terkait lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasional front office di kantor cabang

m. Marketing Manager

- 1) Mengidentifikasi dan mengelola data awal potensi ekonomi wilayahnya.
- 2) Menyusun konsep awal RPT pembiayaan, pendapatan dan gadai
- 3) Memasarkan pembiayaan, pendanaan dan gadai serta memantau hasilnya untuk mencapai portofolio pembiayaan dan pendanaan yang berkembang, sehat dan menghasilkan pendapatan yang optimal bagi cabang.
- 4) Melakukan kunjungan nasabah bersama AO dan FO.
- 5) Melakukan supervisor terhadap AO dan FO dalam rangka proses pembiayaan/ pendanaan baru dan perpanjangan.

n. Accounting Officer

- 1) Bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan yang ada di bagian kredit, seperti: KPR, KPR Sejahtera, KKB, KMG, dst.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengawasi bagian-bagian yang ada pada bagian kredit sesuai dengan tujuan perusahaan.
- 3) prospek, maintenance account, malampaui target yang telah ditetapkan oleh perusahaan

o. Branch Operation Supervisor

- 1) Mengkoordinasi pelaksanaan operasional Bank di Kantor Cabang/ Cabang Pembantu dengan cara memberikan layanan operasional Bank yang akurat dan tepat waktu, sehingga seluruh transaksi dari nasabah dapat ditangani dan diselesaikan secara excellent.
- 2) Memberikan dukungan kepada Manager Operasi dan Pimpinan Cabang, serta seluruh jajaran bisnis dan support di Cabang.

p. Teller

- 1) Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan untuk mencapai service excellent.

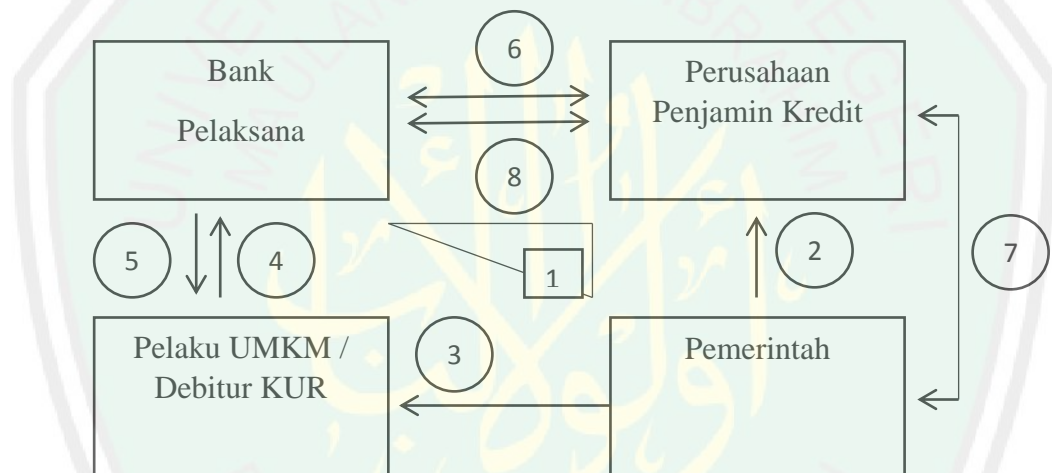
- 2) Memberikan dukungan kepada Supervisor Branch Operation, Operation Manager, Pimpinan Cabang

q. Customer service

- 1) Memberikan informasi baik produk maupun layanan yang dibutuhkan oleh nasabah atau calon nasabah .
- 2) Melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan untuk mencapai service excellent.

1. Implementasi Mekanisme Penyaluran KUR

Berikut ini mekanisme penyaluran KUR dapat dipahami denganbagan dibawah ini dan keterangannya.



Sumber: Mekanisme Penyaluran KUR BRI Syariah KCP Bojonegoro

Keterangan:

1. Nota Kesepahaman Bersama *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah, Perusahaan Penjamin Kredit dan Bank Pelaksana.
2. Pemerintah melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp.2 triliun ke PT. Askrido dan Perum Jamkrido.
3. Pemerintah mempersiapkan UMKM dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan; menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan; melakukan pembinaan dan pendampingan selama kredit/pembiayaan; dan memfasilitasi

hubungan antara UMKM dan Koperasi dengan pihak lain seperti perusahaan inti yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.

4. Pelaku UMKM mengajukan aplikasi KUR ke Bank pelaksana, dan apabila disetujui, pelaku UMKM menjadi debitur KUR di bank penyalur dan berkewajiban untuk membayar cicilan kredit/pembiayaan sesuai dengan ketentuan.
5. Bank pelaksana melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan sesuai ketentuan.
6. Bank pelaksana mengirim daftar debitur KUR ke perusahaan penjamin kredit, yang kemudian memberikan persetujuan penjamin atas kredit pembiayaan yang diberikan oleh bank penyalur, dalam bentuk sertifikat penjaminan.
7. Perusahaan penjamin kredit mengajukan klaim pembayaran Imbal Jasa Peminjam (IJP) ke pemerintah dan pemerintah membayarkan IJP tersebut.
8. Bank penyaluran klaim untuk kredit/pembiayaan yang mencapai status kolektabilitas 4 dan 5 ke perusahaan penjamin kredit, yang kemudian memverifikasi pengajuan tersebut dan membayarkan tagihan klaim sesuai dengan ketentuan.

Efektivitas dalam penyaluran kredit meliputi berhasil atau tidaknya seseorang atau suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan dalam penyaluran kredit, adanya perkembangan dan pertumbuhan yang dialami seseorang ketika adanya penyaluran kredit, dan adanya perbedaan positif secara signifikan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi (sebelum atau sesudah) dalam penyaluran kredit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hariadi sebagai pemilik Toko Jamu Herbal yang menjadi salah satu nasabah KUR BRIS tentang bagaimana proses dalam kredit usaha rayat yang ada di Bank BRI Syariah, Berikut yang beliau sampaikan.

‘Proses dalam pengambilan pinjaman program kredit usaha rakyat ini sangat cepat dan mudah di karenakan pencairan pinjaman nya tidak terlalu lama mungkin 2 hari sudah bisa cair dalam peminjaman dan proses nya sangat mudah hanya dengan foto copy ktp, kk, dan surat usaha yang di ttd oleh kepala desa’

(Wawancara dengan Bapak hariadi (50) Toko Herbal Kamis, 9 Mei 2019 Pukul 09:00 WIB).

Perbankan Syariah merupakan program jasa konsultasi bagi semua kalangan atau lapisan masyarakat yang mempunyai permasalahan dalam hal financial dan tidak dipungut biaya. Semua kalangan masyarakat disini maksudnya, semua masyarakat yang mempunyai masalah keuangan yang membutuhkan bantuan jasa konsultasi atau pedampingan tentang manajemen keuangan mereka yang mengalami masalah.

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/Dp/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah merubah kegiatan usaha yang semula perbankan berdasarkan konvensional diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah islam. Setelah muncul beberapa permasalahan keuangan yang dialami oleh sebagian masyarakat, maka dari itu Bank Rakyat Indonesia Syariah ada untuk membantu para masyarakat yang ingin mengembangkan usaha mereka untuk lebih baik lagi. Selanjutnya ada beberapa prosedur dalam penyaluran KUR kepada para calon nasabah yang mengajukan permohonan kepada pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Bojonegoro. Sumber:<https://brisyariahkcpcbjn.co.id>

Prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Bojonegoro sebagai berikut:

1. Pemasaran KUR Mikro Dalam menjamin agar pemasaran KUR Mikro lebih fokus serta untuk lebih mengoptimalkan fungsi pemasaran Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) ataupun Manajer Bisnis Mikro (MBM), target pemasaran KUR menjadi tanggung jawab Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) ataupun Manajer Bisnis Mikro (MBM). Namun demikian, kepala unit atau mantri tetap dimungkinkan untuk melakukan pemasaran KUR Mikro.

2. Nasabah mendatangi BRIS untuk mencari informasi dan syarat untuk pengajuan kredit, Customer Service memberikan penjelasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.
3. Permohonan dan Pemrakarsa kredit Nasabah datang dengan membawa persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian dengan dibantu oleh Customer Service, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon.
4. Analisa kredit yang dilakukan oleh pihak bank Analisa kredit dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemauan debitur atau terjamin membayar kembali kreditnya kepada bank.
5. Pencairan kredit/ Akad kredit. Setiap proses pencairan kredit (disbursement) harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.

Tujuan didirikan Perbankan Syariah disini adalah untuk membantu masyarakat dalam mengelola keuangan atau cash flow, agar tidak terjebak ke dalam keuangan yang rumit atau istilah lain banyak hutang dan bingung cara menyelesaikannya. Kemudian, dilakukan pendampingan dalam melakukan usaha agar tetap bisa beroperasi atau bisa lebih naik kejenjang yang lebih besar. Dan dapat meminimalisir resiko yang mungkin akan dialami oleh pelaku usaha. Sistem kinerja pada Perbankan Syariah mempunyai sistem yang berbeda-beda tidak ada patokan baku dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang mempunyai permasalahan tentang manajemen keuangan. Penyelesaiannya sesuai dengan kasus permasalahan yang dialami oleh masing-masing individu. Jadi dalam perbankan syariah disini dalam menangani permasalahan lebih fleksibel. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal dalam membantu permasalahan yang dihadapi oleh umat atau pelaku usaha. Sumber:<https://brisyariahkcpcb.jn.co.id>

Hasil penelitian terkait prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Bojonegoro dilakukan dengan jalan:

- a) Pemasaran KUR Mikro, dalam menjamin agar pemasaran KUR Mikro lebih mengoptimalkan fungsi pemasaran Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) ataupun Manajer Bisnis Mikro (MBM), target pemasaran KUR menjadi tanggung jawab Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) ataupun Manajer Bisnis Mikro (MBM).
- b) Nasabah mendatangi BRIS untuk mencari informasi dan syarat untuk pengajuan kredit, Customer Service memberikan penjelasan.
- c) Permohonan dan Pemrakarsa kredit, nasabah datang dengan membawa persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian dengan dibantu oleh Customer Service, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon.
- d) Analisa kredit yang dilakukan oleh pihak bank, analisa kredit dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemauan debitur.
- e) Pencairan kredit/Akad kredit, setiap proses pencairan kredit (disbursement) harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.

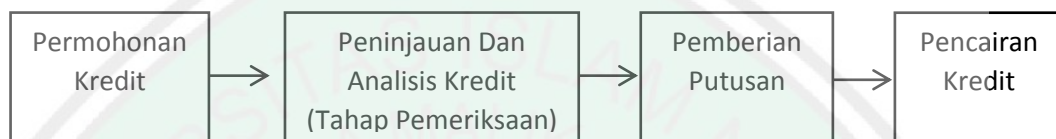
Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana, sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha calon debitur. Dokumen legalitas dan perizinan yang minimal ada pada saat debitur mengajukan KUR kepada Bank antara lain:

1. Identitas diri nasabah, seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, dan lain-lain.
2. Legalitas usaha, seperti akta pendirian, akta perubahan
3. Perizinan usaha, seperti SIU, TDP, SK Domisili dan lain-lain.
4. Catatan pembukuan atau laporan keuangan.
5. Fotocopy dokumen kepemilikan agunan tambahan.

Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah). Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. Sumber:<https://keuangan.kontan.co.id>

2. Proses Pengajuan KUR



Berdasarkan bagan di atas, penulis dapat mengemukakan bahwa proses pemberian KUR dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut :

1. Calon debitur mengajukan pinjaman KUR Mikro ke Unit BRI.
2. *Customer Service* KUR mendata informasi calon debitur seperti nama, alamat, usaha, lama usaha, dan pengajuan jumlah kredit.
3. Calon debitur kemudian memenuhi syarat-syarat untuk dokumentasi BRI. Persyaratan umum calon debitur KUR adalah tidak sedang menerima kredit/pebiayaan modal kerja dan atau investasi dari perbankan lain dan atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah. Calon debitur KUR dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan kredit konsumtif lainnya). Syarat-syarat kelengkapan dokumentasi yang harus dipenuhi oleh calon debitur KUR Mikro adalah sebagai berikut :
 - a) *Fotocopy* KTP (suami istri).
 - b) *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK).
 - c) pas foto 4x6 suami istri
 - d) *Fotocopy* surat nikah (apabila cerai, menggunakan *fotocopy* surat cerai).
 - e) Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kelurahan atau RT/RW setempat (lama usaha minimal 6 bulan).

f) Agunan (berupa sertifikat rumah, BPKB mobil atau sepeda motor)

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat juga memiliki prosedur yang harus di pahami dalam proses pengajuan. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam memberdayakan UMKM di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Bojonegoro dilalui dengan:

1. Proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit / akad kredit. Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis beserta syarat- syarat lain yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP serta surat keterangan usaha. Setelah syarat-syarat dilengkapi, BRIS Raya akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) akan memberikan putusan atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Setelah itu adalah tahap pencairan atau akad kredit, dalam tahap ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan pencairan, tahap penandatanganan perjanjian pencairan, fiat bayar serta pembayaran kredit usaha rakyat. Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah surat pengakuan hutang, dengan ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh kedua belah pihak maka tahap-tahap dalam proses pelaksanaan dalam pemberian kredit usaha rakyat telah selesai sehingga timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. Pada pelaksanaan pemberian Kredit usaha Rakyat untuk KUR Mikro atau KUR yang plafondnya sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat diberikan tanpa agunan, namun agunan tambahan tetap diminta oleh pihak BRIS. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi resiko kredit sebesar 30%.

4.2 Dampak Implementasi Kebijakan KUR Bagi Pengembangan UMKM

Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa perang strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau. Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain UMKM masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, serta kemitraan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang termasuk dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (klaster 3). Klaster ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.

Pembahasan dan analisis hasil penelitian merupakan pemaparan data dan informasi yang peneliti dapatkan dari lapangan yang kemudian disesuaikan dengan *grand theory* yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

Teori implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model teori implementasi yang dipaparkan oleh Merilee S. Griendle (1980). Model ini memaparkan bahwa, implementasi kebijakan ditentukan oleh 2 faktor yaitu: isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasinya (*context of policy*). Ide dasarnya dari teori ini adalah bahwa setelah kebijakan dilaksanakan, maka kebijakan bisa dilihat keberhasilannya yang ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

4.2.1 *Content of Policy*

Dalam variabel *content of policy*, terdapat 6 (enam) dimensi yang menjadi sebuah indikator sejauh mana implementasi kebijakan berjalan. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

4.2.1.1 **Keentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan**

Bagaimana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan serta mempengaruhi isi kebijakan. Bahwa kebijakan KUR dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemudahan pelaku usaha kecil mengakses pembiayaan permodalan.

1. **Kebijakan Program KUR Tepat Sasaran**

Wawancara dengan Bapak Afroni Kepala Bagian Marketing Unit BRI Syariah KCP Bojonegoro, diketahui bahwa selama ini program KUR berjalan tepat sasaran dan sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Berikut wawancara yang peneliti lakukan:

“Penyaluran KUR sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karena itu bisa dipastikan bahwa penyaluran KUR sudah tepat sasaran dan diperuntukkan bagi sektor usaha kecil yang belum bankable. Audit rutin juga sering dilakukan baik dari Pusat maupun Cabang sehingga jika tidak tepat sasaran maka pasti akan segera diketahui.” (Wawancara dengan (I.1) Afroni (38) KABAG Marketing Unit BRI Syariah KCP Bojonegoro. Rabu, 8 Mei 2019 Pukul 11:50 WIB).

Berikut wawancara dengan Bapak Bisri yang merupakan Pedagang Bakso.

“ Program KUR sudah tepat sasaran dan tempat UMKM dikarenakan Program Kur merupakan program yang memberikan bunga yang sangat ringan, maka dari itu program ini sangat membantu dalam modal UMKM dan bisnis yang saya miliki dapat berkembang” (Wawancara dengan Bapak Bisri (48) Pedagang Bakso Kamis, 9 Mei 2019 Pukul 10:00 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa berdasarkan data yang ada, penyaluran pembiayaan KUR sudah tepat sasaran karena didasarkan pada penegakkan aturan dan SOP yang sudah ditetapkan. Sementara dari hasil observasi lapangan yang peneliti lakukan, penyaluran dana KUR tidak tepat sasaran kepada pelaku usaha kecil. Selain itu peran pemerintah daerah juga minim dalam pengawasan penyaluran KUR ini padahal program KUR merupakan program

pemerintah pusat dalam rangka menyediakan akses permodalan bagi usaha-usaha kecil yang belum *bankable*.

2. Kebijakan Program KUR berpengaruh terhadap kesejahteraan target sasaran

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Afroni KABAG Marketing BRI Syariah KCP Bojonegoro, program KUR jika dipergunakan untuk sektor usaha-usaha produktif maka akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Berikut wawancara yang peneliti lakukan:

“Jika penggunaan KUR sesuai dengan anjuran pemerintah, artinya dana yang diperoleh diperuntukkan bagi sektor usaha produktif, maka manfaat dari program KUR akan sangat terasa. Karena dengan program KUR, pemilik usaha kecil bisa mengembangkan usahanya karena dengan program KUR pelaku usaha kecil (UMKM) dapat menambah modal usaha dengan bunga dan cicilan yang ringan yaitu sebesar 0,3% perbulan dan 7% total pertahunnya.” (Wawancara dengan (I.1) Afroni (38) Kabang Marketing BRIS KCP Bojonegoro. Rabu, 8 Mei 2019 Pukul 12:10 WIB).

Berikut wawancara dengan Bapak Bisri yang merupakan Pedagang Bakso.

“ Program KUR dapat memberikan bantuan modal dalam usaha saya, sehingga bisnis yang saya miliki dapat maju dan berkembang kelebihan. Program KUR yaitu bunga ringan yaitu 0,3 % perbulan dan total bunga pertahunnya yaitu 7% ” (Wawancara dengan dengan Bapak Bisri (48) Pedagang Bakso Kamis, 9 Mei 2019 Pukul 10:15 WIB).

Menurut peneliti, jika mengacu pada aturan yang sudah ditentukan serta penyaluran program yang tepat sasaran, maka program KUR sesungguhnya bermanfaat bagi target sasaran untuk memperbaiki taraf kesejahteraannya. Bagi pelaku UMKM, manfaat KUR adalah untuk membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Sementara bagi pemerintah, manfaat KUR adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

4.2.1.2 Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Dalam implementasi kebijakan, manfaat yang dihasilkan oleh target sasaran (*target groups*) harus diperhatikan. KUR sendiri diperuntukkan untuk membantu pembiayaan yang dibutuhkan oleh UMKM untuk mengembangkan

kegiatan usahanya. Sedangkan bagi pemerintah, manfaat KUR adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMdalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

Berikut wawancara yang peneliti lakukan.

“ Dalam manfaat yang ada di Program KUR ini sangat memberikan hal yang positif dikarenakan sangat membantu dalam hal permodalan dan investasi dan hasilnya UMKM merasakan hasil usaha-usaha produktif dan akan bermanfaat bagi UMKM ” (Wawancara dengan Afroni (38) Kabag Marketing BRIS KCP Bojonegoro Rabu, 8 Mei 2019 Pukul 12:10 WIB).

Berikut wawancara dengan Bapak Bisri yang merupakan Pedagang Bakso.

“ Dengan menggunakan program KUR dapat memberikan pinjaman dana sebagai modal dalam usaha bisnis saya. Sebelum saya mengambil program KUR usaha yang saya miliki masih dalam keadaan kurang stabil dikarenakan modal yang saya miliki masih minim ” (Wawancara dengan dengan Bapak Bisri (48) Pedagang Bakso Kamis, 9 Mei 2019 Pukul 10:15 WIB).

Program KUR diperuntukan untuk masyarakat yang ingin berwirausaha dari usaha kecil dan menengah. Pemerintah bekerja sama dengan dengan beberapa bank di Indonesia dengan tingkat suku bunga yang berbeda di tiap banknya. Namun tidak semua bank di Indonesia yang dapat menyalurkan kredit usaha rakyat. Dari berita yang dikutip dari situs KONTAN.CO.ID – JAKARTA, 4 Juli 2019 Bahwa salah satu bank di Indonesi yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI, anggota indeks Kompas100 ini). Bank pelat merah ini menyalurkan kredit mikro lewat fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Per 30 Juni 2019, realisasi kredit mikro perseroan mencapai Rp 875 miliar dengan jumlah debitur 67rb orang. Peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal. Demikian juga kebijakan yang diambil yang cenderung berlebihan namun tidak efektif, hingga kebijakan menjadi kurang komprehensif, kurang terarah, serta bersifat tambal-sulam. Dengan program KUR ini diharapkan masalah akses permodalan yang dihadapi pelaku UMKM bisa teratasi.

4.2.1.3 Bagaimana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan

Dalam penerapan suatu kebijakan, ada sebuah perubahan yang diinginkan dari pembuat kebijakan tersebut. Dari penerapan program KUR yang dilakukan pemerintah ada suatu tujuan (*goal point*) yang ingin dicapai.

1. pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mempercepat Mikro, Kecil, Menengah. (UMKM);
2. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & Koperasi kepada Lembaga Keuangan;
3. Sebagai upaya penanggulangan / pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

1. Bentuk perubahan yang dihasilkan setelah pelaksanaan Program KUR

Dalam setiap pelaksanaan program, tentunya memiliki target atau tujuan yang ingin dicapai untuk mengukur tingkat keberhasilan dari suatu program. Program KUR juga memiliki target yang ingin dicapai (*goal point*) untuk mengukur berhasil tidaknya penerapan program KUR tersebut.

Penerapan program KUR di wilayah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro juga diharapkan memberikan perubahan yang lebih baik, baik dari segi perekonomian, tingkat kesejahteraan serta pengurangan angka pengangguran.

Berikut wawancara yang peneliti lakukan:

“Program KUR belum memberikan dampak perubahan yang signifikan, artinya perubahan yang ada baru sebatas berkembangnya usaha-usaha kecil di wilayah Sugihwaras, belum pada tahap meningkatnya perekonomian dan baru menyerap sedikit tenaga kerja dari berkembangnya suatu usahanya” (Wawancara dengan Afroni (38) Kabag Marketing BRIS KCP Bojonegoro Rabu, 8 Mei 2019 Pukul 12:15 WIB).

Berikut wawancara dengan Bapak Bisri yang merupakan Pedagang Bakso.

“Bentuk perubahan yang saya rasakan sangat membantu dalam usaha saya dikarenakan Program KUR sangat ringan dalam bunganya dan usaha saya semakin maju” (Wawancara dengan dengan Bapak Bisri (48) Pedagang Bakso Kamis, 9 Mei 2019 Pukul 10:20 WIB).

1. **Bagaimana peran pelaksana program dalam sosialisasi KUR**

Tahun 2007, ketika program KUR mulai berjalan, pemerintah sudah menunjuk langsung Bank pelaksana yang akan melaksanakan program yang di cetuskan pemerintah tersebut. Program penyaluran KUR untuk pengembangan usaha rakyat oleh pemerintah bekerjasama dengan perbankan merupakan langkah yang positif dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan sebagai pondasi perekonomian daerah. Keberhasilan suatu program dapat diukur dari seberapa jauh tingkat sosialisasi yang dilaksanakan. Sebagai Bank pelaksana, selain bertugas menyalurkan kredit juga memiliki tugas untuk sosialisasi tentang program KUR.

4.3 *Context of Policy*

Dalam variabel context of policy, terdapat 2 (dua) dimensi yang menjadi sebuah indikator sejauh mana implementasi kebijakan berjalan. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

4.3.1 **Bagaimana kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan**

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan. Menurut peneliti, pentingnya KUR dalam mendorong kesejahteraan masyarakat membutuhkan peran berbagai pihak, baik pihak Bank pelaksana sebagai penyalur dana kredit, Pemerintah daerah sebagai fasilitator, maupun masyarakat sebagai subyek dari program KUR itu sendiri.

Semangat Program KUR adalah semangat untuk memajukan perekonomian dari daerah. Dalam era otonomi daerah maka setiap program yang sifatnya Nasional seyogyanya dilaksanakan secara terkordinasi dengan pemerintah daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, begitu juga dengan program nasional Kredit Usaha Rakyat. Dengan adanya Program Kredit Usaha

Rakyat (KUR) usaha kecil dan menengah diharapkan mampu bertahan menguat dan memulihkan perekonomian nasional, disamping bisa lebih berdaya yang menuju kepada kesejahteraan. Program KUR bertujuan memberikan bantuan secara materil terhadap usaha kecil dan menengah, dimana modal merupakan permasalahan utama usaha kecil dan menengah. Program Kredit Usaha Rakyat merupakan program nasional yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM.

4.3.2 Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para target sasaran, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari sasaran dalam menanggapi suatu kebijakan.

1. Kebijakan KUR yang diimplementasikan oleh pemerintah

Bagi pelaku usaha seperti Bapak Rahmat Jaya, adanya kebijakan program KUR merupakan suatu angin segar dalam kehidupan usahanya. Dengan KUR, beliau terbantu untuk menambah modal dengan bunga ringan. Berikut wawancara dengan Bapak Rahmat Jaya yang merupakan pengrajin/konveksi:

“Program KUR sangat terasa bagi saya selaku orang yang memiliki usaha kecil, kebijakan KUR pemerintah ini sudah baik karena mendorong usaha-usaha kecil untuk maju. Hanya saja dari segi persyaratan masih terlalu berbelit-belit, kemudian harusnya ditiadakan jaminan karena ga semua punya jaminan.” (Wawancara dengan (I.6) Rahmat Jaya (47) Pengrajin/Konveksi. Kamis, 9 Mei 2019 Pukul 14:04 WIB).

Berikut wawancara yang peneliti lakukan.

“Penyaluran KUR sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun semestinya kebijakan program KUR lebih di permudah dalam persyaratan agar pihak UMKM tidak terlalu kesulitan untuk mengambil pinjaman dan petugas pun dapat secara mudah dan cepat untuk menyalurkan dana KUR tersebut” (Wawancara dengan Afroni (38) Kabag Marketing BRIS KCP Bojonegoro Rabu, 8 Mei 2019 Pukul 12:25 WIB).

Tanggapan dari para pelaku usaha kecil sangat beragam. Ada juga yang menanggapi bahwa program KUR masih tidak jelas sasarannya karena masih banyak nasabah (pelaku program KUR) banyak menggunakan dana pinjaman bukan diperuntukan untuk pengembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM)

namun untuk keperluan lain bahkan tidak jelas arahnya. Jadi kepatuhan terhadap aturan yang sudah di tetapkan dirasa sangat kurang mungkin bisa disebabkan dari pihak banknya sendiri ataupun dari pelaku usaha yang bersangkutan.

2. Manfaat Kebijakan KUR

Kebijakan program KUR merupakan suatu angin segar dalam iklim ekonomi yang tidak menentu. Dengan adanya KUR, pelaku usaha terdorong untuk mengembangkan usahanya tanpa dipusingkan bunga bank yang tinggi. Berikut wawancara dengan Bapak Midun:

“Bagi saya, pengusaha kecil ini adanya KUR ibaratkan sebuah berkah. Ini bukti pemerintah masih peduli terhadap usaha kecil di Negara ini dan ini merupakan kebijakan yang pro rakyat” (Wawancara dengan (I.6) Midun (47) Pengrajin/Konveksi. Kamis, 9 Mei 2019 Pukul 14:15 WIB).

Berikut wawancara yang peneliti lakukan.

“ Dalam pihak bank sendiri melayani Program KUR ini sangat baik untuk membantu dalam UMKM sesuai dalam aturan pemerintah, agar para Usaha Mikro Kecil Dan Menengah UMKM dapat lebih sejahtera ” (Wawancara dengan Afroni (38) Kabag Marketing BRIS KCP Bojonegoro Rabu, 8 Mei 2019 Pukul 12:10 WIB).

Dari jawaban tersebut, kita melihat bahwa Program KUR sangat membantu pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dan menambah aspek permodalan dalam usahanya.

a. Keberhasilan Implementasi Kebijakan KUR

Sementara dari temuan di lapangan, Jika mengacu pada aturan yang sudah ditentukan serta penyaluran program yang tepat sasaran, program KUR sesungguhnya bermanfaat bagi target sasaran untuk perbaikan taraf kesejahteraannya. Berdasarkan temuan di lapangan terdapat beberapa kasus mengenai dana KUR turun pada yang bukan semestinya atau yang bukan pada usaha produktif seperti yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Temuan dilapangan, ada beberapa kasus dana KUR dipergunakan bukan sebagai tambahan modal usaha produktif. Hal ini sebenarnya yang membuat program KUR kurang begitu optimal dirasakan oleh pelaku usaha.

Berikut wawancara dengan Bapak Riza yang merupakan Toko Sembako.

“Dalam usaha saya, sebelum mengambil program KUR belum begitu stabil dan modal yang saya peroleh masih kurang, untuk meberikan modal dalam usaha saya” (Wawancara dengan dengan Bapak Riza (28) Pedagang Toko Sembako Jum’at, 10 Mei 2019 Pukul 10:00 WIB).

Berikut wawancara yang peneliti lakukan.

“Program KUR sudah membawah suatu hal yang positif dan berhasil diterima oleh masyarakat dan sangat membantu bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah UMKM” (Wawancara dengan Afroni (38) Kabag Marketing BRIS KCP Bojonegoro Rabu, 8 Mei 2019 Pukul 12:30 WIB).

Sebenarnya, tujuan dari program KUR adalah memajukan usaha-usaha sektor rill, meningkatkan taraf hidup pelaku usahanya serta meminimalkan angka pengangguran. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harusnya bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Dengan adanya program KUR hendaknya pemerintah daerah ikut mendorong pengembangan usaha-usaha daerah dengan turut memfasilitasi usaha-usaha kecil yang ada agar mendapatkan fasilitas pembiayaan dari KUR.

Keberhasilan suatu program dapat diukur dari seberapa jauh tingkat sosialisasi yang dilaksanakan. Sosialisasi merupakan faktor yang penting yang menjadi penentu berhasil tidaknya suatu program. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sosialisasi program KUR tidak hanya menjadi peran dari bank pelaksana, tetapi juga merupakan peran dari pemerintah daerah selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Minimnya peran pemerintah daerah ini, menghambat kemajuan program KUR itu sendiri sehingga tujuan dari penerapan. Berikut diperjelas dengan wawancara yang dilakukan kepada ibu pratiwi yang berprofesi sebagai pedagang Buah yang juga mengambil dana KUR :

“Implementasi program KUR menurut saya sudah memberikan respon yang sangat baik bagi nasabah. Realisasi KUR sudah tepat dalam melakukan sasaran bagi calon nasabah yang membutuhkan program KUR ”

(WawancaraJum 'at 10 Mei 2019 Pukul 15.10 Ibu Pratiwi toko buah)

Berikut wawancara yang peneliti lakukan.

“Keberhasilan suatu program dapat diukur dari seberapa jauh tingkat sosialisasi yang dilaksanakan. Sosialisasi merupakan faktor yang penting yang menjadi penentu berhasil tidaknya suatu program“(Wawancara dengan Afroni (38) Kabag Marketing BRIS KCP Bojonegoro Rabu, 8 Mei 2019 Pukul 12:15 WIB).

UKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian, UKM juga sangat membantu dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit-unit baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Melihat kenyataan di lapangan bahwa memang masih banyak kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi UKM diKecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Pertama terkait dengan SDM (Sumber Daya Alam), kedua masalah teknologi, ketiga permodalan dan terakhir masalah kerjasama usaha atau jarinn usaha.

1. Terkait dengan masalah SDMnya, karena rata-rata pendidikan pemilik UKM yaitu rata-rata pendidikannya paling tinggi SLTA jika ada sarjana tidak banyak. Jadi berbicara masalah SDM jalan keluarnya, pihak dinas melaksanakan bagaimana mengembangkan UKM lewat pelatihan-pelatihan yang pernah di lakukan antara lain pelatihan kewirausahaan.
2. Selanjutnya terkait dengan masalah teknologi, misalnya pengusaha kecil yang bergerak dibidang industri yang masih menggunakan teknologi sederhana, untuk pembinaan dalam teknologi yang bisa memberi pembinaan yaitu dinas perindustrian secara teknologi.
3. Kemudian yang terkait dengan masalah permodalannya, Dinas Koperasi dan UMKM melalui pendekatan pembentukan kelompok usaha, yang telah di bentuk pihak Dinas Koperasi dan UMKM kelompok kewirausahaan.

Hal ini berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pengguna dana KUR. Setelah usahanya mengalami peningkatan maka dalam dirimasyarakat akan muncul keinginan untuk memenuhi semua kebutuhannya mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan. Setelah

kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi maka akan muncul kebutuhan lainnya. Masyarakat pengguna dana KUR yang usahanya meningkat akan mulai memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan fisiologis seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian banyak debitur yang yang merenovasi rumah bahkan membangun rumah dari hasil perkembangan usahanya setelah menggunakan dana KUR. Tetapi setelah kebutuhan dasar terpenuhi maka akan muncul kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kebutuhan rasa aman dan kepastian, jenis kebutuhan yang ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan, situasi yang bisa diperkirakan, bebas dari rasa takut, cemas dan sebagainya. Karena adanya kebutuhan inilah maka manusia membuat peraturan, UU, mengembangkan kepercayaan, membuat sistem, asuransi, pension.

Kebutuhan lainnya yang akan muncul yaitu kebutuhan cinta dan hubungan antar manusia dalam hal ini memiliki teman, memiliki keluarga dan sebagainya. Setelah kebutuhan tersebut terpenuhi maka akan muncul lagi kebutuhan penghargaan dan pengakuan dalam hal ini ada dua macam kebutuhan akan harga diri. Pertama adalah kebutuhan-kebutuhan akan penguasaan, kompetensi, percaya diri dan kemandirian. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, kebanggaan dianggap penting dan apresiasi dari orang.

KUR terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan UKM di Kecamatan Sugihwaras. KUR memberikan pinjaman modal bagi para pelaku UKM sehingga mereka dapat terus menjalankan usahanya tanpa khawatir masalah modal. Dengan adanya program Kredit Usaha Rakyat ini dinilai layak dipertahankan dan perlu untuk tetap dilanjutkan karena program KUR dianggap sudah memihak kepada masyarakat/debitur, khususnya debitur penerima KUR. Maka keberadaan program KUR juga masih sangat dibutuhkan pada saat ini oleh debitur. Berikut ini analisa mengenai penyaluran implementasi dana KUR dengan menggunakan indikator Merile S Grindel yaitu sebagai berikut analisisnya :

Tabel 4.1 Temuan Lapangan

No	Kriteria	Pembahasan	Temuan di lapangan
----	----------	------------	--------------------

Content of Policy			
1	Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan	<p>a. Kebijakan Program KUR tepat sasaran</p> <p>b. Kebijakan Program KUR berpengaruh terhadap kesejahteraan target sasaran</p>	<p>a. Dari hasil penelitian, peneliti dapat menemukan memang bahwa penyaluran KUR tidak tepat sasaran.</p> <p>b. Program KUR bermanfaat bagi target sasaran untuk perbaiki taraf Kesejahteraannya jika penyalurannya tepat sasaran</p>
2	Jenis manfaat Yang akan dihasilkan	a. Manfaat kebijakan Program KUR terhadap target sasaran	a. Program KUR sendiri memiliki manfaat yaitu: membantu pembiayaan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha sektor UMKMserta usaha-usaha produktif lainnya.
3	Bagaimana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan	a. Bentuk perubahan yang pelaksanaan program KUR dihasilkan setelah pelaksanaan Program KUR	a. Sejak diterapkannya pada 2007, perubahan yang menjadi harapan pemerintah belum terwujud. Menurut peneliti, hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti kurang tepatnya sasaran penyaluran KUR.

4	Apakah letak sebuah program sudah tepat	<p>a. KUR bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan</p> <p>b. Seberapa besar pengaruh program KUR terhadap peningkatan perekonomian di suatu daerah?</p>	<p>a. Tujuan program KUR ini adalah agar bisa memajukan usaha-usaha sektor riil, meningkatkan taraf hidup pelaku usahanya serta meminimalkan pada angka pengangguran</p> <p>b. Setiap upaya yang diberikan dalam pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.</p>
5	Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci	<p>a. Bagaimana peran pelaksana program dalam sosialisasi KUR</p> <p>b. Seperti apa pelaksana program melaksanakan program KUR</p>	<p>a. Keberhasilan suatu program dapat diukur dari seberapa jauh tingkat sosialisasi yang dilaksanakan. Sosialisasi merupakan faktor yang penting yang menjadi penentu berhasil tidaknya suatu program.</p> <p>b. Pelaksanaan Program KUR sudah berjalan dengan baik di wilayah Kecamatan Warunggunung. Karena bank pelaksana dituntut untuk dapat melaksanakan program dengan baik.</p>

6	Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai	<p>a. Sebagai pelaksana kebijakan apakah sumberdaya yang dimiliki sudah memadai untuk pelaksanaan program KUR</p> <p>b. Bekal apa yang diberikan kepada bawahan dalam pelaksanaan program KUR</p>	<p>a. Dari hasil wawancara diperoleh hasil bahwa, sebagai bank pelaksana, BRI sudah siap menjalankan program KUR tersebut. Dari segi sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya</p> <p>b. Perbaikan dari segala sumber daya yang ada. Hal ini diperkuat oleh pernyataan mantri yang membidangi penyaluran KUR pada Bank BRI Unit Sampai bahwa yang sering dilaksanakan pelatihan-pelatihan dan dilakukan bimbingan teknis sampai pada diklat. Seperti itulah saha-usaha yang dilakukan perusahaan</p>
---	---	---	--

<i>Context of Policy</i>			
1	Bagaimana kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan	<p>a. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam sosialisasi program KUR</p> <p>b. Program KUR berdampak positif bagi daerah?</p>	<p>a. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak berfungsi sebagai fasilitator pada masyarakat atau pelaku usaha kepada Bank. Hal ini merupakan tugas yang diemban oleh daerah dalam ikut serta dalam program KUR.</p> <p>b. Dampak positif dari adanya program KUR di daerah adalah, meningkatnya sector sektor usaha produktif di daerah, memajukan usaha usaha khas daerah serta Mengurangi Pengangguran dengan cara meningkatnya produksi yang ada. Maka dengan adanya KUR, diharapkan perekonomian didaerah semakin terangkat.</p>
2.	Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa	a. Seperti apa peran Kecamatan dalam pelaksanaan program KUR	a. Kecamatan memiliki peran dalam tahapan membantu sosialisasi program KUR serta pendampingan bagi UMKMd di wilayahnya untuk dapat di fasilitasi dengan instansi terkait.

		<p>b. Sejahterama peran partisipasi pemerintah daerah agar program KUR tepat sasaran</p>	<p>b. Peran pemerintah daerah adalah sebagai fasilitator antara pelaku usaha dengan bank pelaksana. Fungsinya yaitu sebagai tenaga kerja dampingan melalui instansi yang terkait yang saling berhubungan dengan bidang usaha yang diperoleh dari UMKM yang ada. Selain itu, tugas pemerintah daerah juga mengontrol penerima KUR dan melakukan verifikasi agar program ini jatuh kepada yang memang berhak mendapatkannya.</p>
3.	<p>Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.</p>	<p>a. Bagaimana menurut anda kebijakan KUR yang diimplementasi oleh pemerintah.</p> <p>b. Apakah kebijakan KUR cukup membantu anda dalam menjalankan usaha</p>	<p>a. Kebijakanprogram KUR merupakan suatu angin segar dalam kehidupan usahanya. Dengan KUR, banyak pihak terbantu untuk menambah modal dengan bunga ringan dan mudah diakses oleh siapapun.</p> <p>Kebijakan program KUR merupakan suatu angin segar dalam iklim ekonomi yang tidak menentu. Dengan adanya KUR, pelaku usaha terdorong mengembangkan usahanya tanpa dipusingkan bunga bank</p>

		c. Alasan apa yang membuat anda memutuskan untuk tidak mengajukan pinjaman KUR	yang tinggi. c. Kebijakan program KUR merupakan suatu angin segar bagi pengusaha yang usahanya masih kategori usaha kecil atau mikro. Hanya saja masih ada sebagian pengusaha yang belum tertarik dengan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan berbagai alasan.
--	--	--	--

4.4 Hambatan-hambatan Upaya Pemerintah dalam Menyalurkan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Bojonegoro

Dalam menerapkan perbankan Syariah di Bank Rakyat Indonesia Syariah tidak selalu berjalan dengan lancar. Dalam penerapannya juga mempunyai beberapa hambatan. Hambatan-hambatan upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Bojonegoro:

1. Banyaknya calon debitur yang tidak mempunyai manajemen keuangan yang baik sehingga hal ini menyulitkan bank untuk menganalisa pendapatan debitur. Hal ini sangat merugikan pihak perbankan syariah jika nasabah tidak paham betul bagaimana memanageren uangnya, karena bisa menghambat pelunasan, maka dari itu pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah selalu mendampingi dan mengontrol perkembangan usaha nasabahnya setiap minggu, dengan hal ini pihak perbankan syariah juga bisa meminimalisir terjadinya kredit macet yang disebabkan kurangnya pendapatan debitur. Pihak perbankan syariah juga bisa

mampu memberikan beberapa strategi agar usaha yang ditekuni bisa berjalan dengan baik.

2. Kredit bermasalah Kerugian akibat tidak tertagihnya dana yang telah disalurkan dan kredit yang digolongkan macet adalah kredit tersebut tidak ada kemungkinan tertagih kembali, dan pinjaman pokok yang dalam pengaplikasian kredit termasuk kedalam kredit macet yang kemungkinan akan dihapus bukukan. Hal ini perlu diperhatikan lebih, karena jika di biasakan mengalami kredit bermasalah bisa merugikan pihak debitur maupun kreditur, pengawasan dalam hal ini sangat perlu ditekankan agar masalah seperti ini tidak terus-menerus terjadi kembali, diingat ini merupakan program pemerintah yang tujuannya ingin mempermudah para UMKM untuk terus mampu mengembangkan usaha mereka untuk lebih baik lagi. Dalam pencairan dana Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia Syariah ini tidak menggunakan Agunan seperti pembiayaan lainnya, maka dari itu resiko-resiko kecil sampai besarpun kerap terjadi dikarenakan agunannya berbeda dengan pembiayaan lainnya, dari pihak perbankan syariah pun juga sudah memikirkan hal ini sedemikian rupa, maka dari itu pihak perbankan syariah selalu mendampingi para nasabah mereka dengan member strategi-strategi bisnis agar usaha mereka berjalan dengan baik.
3. Pemahaman yang kurang tepat dari masyarakat bahwa KUR adalah bantuan dari pemerintah Kendala utama dalam penyaluran KUR adalah soal pemerataan penyaluran. Kemampuan menjangkau hingga ke pelosok Tanah Air masih menjadi persoalan. Letak geografis Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi penyaluran program ini. Hal ini perlu diingat dan selalu diperhatikan, tugas perbankan Indonesia adalah salah satunya membantu masyarakat dari permasalahan keuangan, maka dari itu pihak perbankan syariah pun tidak ada henti-hentinya memberikan informasi terbaru seputar program-program perbankan tersebut. Masyarakatpun tentunya harus paham betul tentang program pemerintah ini yang sangat membantu perkembangan UMKM dari

program pemerintah yang memberi dana dengan syarat yang sangat mudah di dapatkan.

Dalam perbankan syariah maupun perbankan konvensional, hambatan-hambatan di dalam dunia perbankan sudah biasa terjadi, namun semua itu pasti ada cara atau strategi dalam meminimalisir hambatan-hambatan tersebut. Dalam memilih Nasabah yang amanah dan dapat dipercaya untuk meminimalisir adanya suatu hal yang tidak diinginkan, pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah lebih mengutamakan anggota yang mengikuti jamaah rutin yang diadakan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah hari Jumat pukul 05.30 – 06.30 WIB. Karena lebih mengetahui karakternya sebab sering bertemu. Apabila diluar jamaah maka dari pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah akan mencari informasi tentang karakter Nasabah tersebut dengan bertanya kepada jamaah yang mengenalnya atau tetangganya. Dengan itu, pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah akan lebih mengetahui bagaimana karakter yang dimiliki oleh Nasabah tersebut.

Dari hambatan-hambatan yang dialami pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah mempunyai beberapa solusi, antara lain:

1. Solusi untuk orang yang tidak amanah karena kebutuhan yang mendesak, dengan menggunakan solusi berkah bersama, dimana akan merumuskan bersama antara pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah dengan nasabah untuk mencari solusi agar usaha tersebut bisa kembali lagi, apabila usaha yang dikelola oleh nasabah bangkrut.
2. Mencarikan pelatihan atau pendampingan, untuk nasabah yang mempunyai usaha tambahan dan masih memungkinkan untuk melanjutkan usahanya.
3. Menghentikan kerjasama dengan nasabah, bagi nasabah yang sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk mengelola usaha tambahan. Hasil wawancara terkait hambatan-hambatan upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Bojonegoro yaitu:

- a. Banyaknya calon debitur yang tidak mempunyai manajemen keuangan yang baik sehingga hal ini menyulitkan bank untuk menganalisa pendapatan debitur.
- b. Kredit bermasalah, kerugian akibat tidak tertagihnya dana yang telah disalurkan dan kredit yang digolongkan macet adalah kredit tersebut tidak ada kemungkinan tertagih kembali, dan pinjaman pokok yang dalam pengaplikasian kredit termasuk kedalam kredit macet yang kemungkinan akan dihapus bukukan.
- c. Pemahaman yang kurang tepat dari masyarakat bahwa KUR adalah bantuan dari pemerintah.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang masalah dan temuan-temuan di lapangan mengenai penelitian “Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak” peneliti mendapatkan kesimpulan akhir bahwa implementasi kebijakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro kurang maksimal.

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa penyaluran KUR belum sepenuhnya tepat sasaran. Sementara dari temuan di lapangan, penyaluran KUR banyak diserap bukan untuk sektor usaha produktif. Jika mengacu pada aturan yang sudah ditentukan serta penyaluran program yang tepat sasaran, program KUR sesungguhnya bermanfaat bagi target sasaran untuk memperbaiki taraf kesejahteraannya. Berdasarkan temuan di lapangan terdapat beberapa kasus mengenai dana KUR turun pada yang bukan semestinya atau yang bukan pada usaha produktif seperti yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Temuan dilapangan, ada beberapa kasus dana KUR dipergunakan bukan sebagai tambahan modal usaha produktif. Hal ini sebenarnya yang membuat program KUR kurang begitu optimal dirasakan oleh pelaku usaha. Program KUR sendiri memiliki manfaat yaitu: membantu pembiayaan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha sektor UMKMserta usaha-usaha produktif lainnya. Penerapan KUR sendiri diharapkan terjadi percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMdalam rangka penanggulangan/ pengentasan kemiskinan. Sejak diterapkannya pada 2007, perubahan yang menjadi harapan pemerintah belum terwujud. Menurut peneliti, hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti kurang tepatnya sasaran penyaluran KUR. Ke depan diharapkan bahwa program KUR membawa perubahan signifikan

bagi kelangsungan usaha-usaha kecil dan mikro serta membawa manfaat bagi masyarakat.

Tujuan dari program KUR ini bisa memajukan usaha-usaha sektor riil, meningkatkan taraf hidup pelaku usahanya serta meminimalkan angka pengangguran. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harusnya bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Dengan adanya program KUR hendaknya pemerintah daerah ikut mendorong pengembangan usaha-usaha daerah dengan turut memfasilitasi usaha-usaha kecil yang ada agar mendapatkan fasilitas pembiayaan dari KUR.

Keberhasilan suatu program dapat diukur dari seberapa jauh tingkat sosialisasi yang dilaksanakan. Sosialisasi merupakan faktor yang penting yang menjadi penentu berhasil tidaknya suatu program. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sosialisasi program KUR tidak hanya menjadi peran dari bank pelaksana, tetapi juga merupakan peran dari pemerintah daerah selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik ditingkat kecamatan maupun pada instansi terkait sebenarnya bisa lebih mengoptimalkan program KUR yang sedang berjalan. Hanya saja hal ini tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran agar implemmtasi program KUR berjalan optimal sehingga membantu dalam perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Saran tersebut sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sosialisasi mengenai program KUR baik oleh bank pelaksana maupun oleh pemerintah daerah yang merupakan fasilitator masyarakat dalam pengajuan pembiayaan KUR. Sosialisasi yang kurang optimal sehingga membuat penyaluran dana KUR kurang optimal.

2. Penguatan kerjasama antara Bank pelaksana dengan pemerintah daerah agar terciptanya sinergitas pengelolaan program KUR sehingga meminimalisir penyelewengan dan tidak tepat sasaran dari program KUR itu sendiri.
3. Memperketat pengawasan dari pemerintah terkait penyaluran KUR sehingga tidak ada lagi dana KUR yang turun kepada yang tidak berhak menerimanya.
4. Memperketat pengawasan dari pemerintah terkait penyaluran KUR sehingga tidak ada lagi dana KUR yang turun kepada yang tidak berhak menerimanya.
5. Mengkaji kembali persyaratan pengajuan KUR sehingga lebih meringankan pelaku usaha kecil dalam memperoleh bantuan usaha dari pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Wardana dan Cut Irna Setiawati (2015) Analisis Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Indonesia November 2012-April 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Asiyah Binti Nur. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- BPS. Dalam Jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur Bagian Barat. http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1224:program-kur-lampautarget-kemenkop-dan-ukm-lakukan, diakses 13February 2019).
- Diah Setyorini Gunawan, Neni Widayaningsih, Barokatuminalloh (2017) The Strategy Development of SME's Metal. <https://tirto.id/ojk-terus-mengkaji-model-bisnis-baru-program-kur-cljE> (Diakses 10 April 2019).
<http://digilib.uinsgd.ac.id/8406/> Diakses (10 April 2019).
<https://kur.ekon.go.id/> Diakses (12 Maret 2019).
<https://brisyariah-izinkur.co.id/> Diakses (12 Maret 2019).
<https://keuangan.kontan.co.id/> Diakses (13 Maret 2019).
<https://djpbk.kemenku.go.id/> Diakses (13 Maret 2019).
<https://ojkumkm.co.id/> Diakses (21 Maret 2019).
<https://dsnmui.or.id/> Diakses (22 Maret 2019).
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2017). Program KUR Lampau Target Kemenkop dan UKM Lakukan Pendampingan 430 Koperasi Seluruh Indonesia, (*online*), (http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1224:program-kurlampautarget-kemenkop-dan-ukm-lakukan, diakses 13February 2019)

- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-22/M.EKON/10/2009 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi.
- Koesrianti (2016) *Law Reform Of Small And Medium Enterprises (Smes) And Equitable Cooperative For Competitiveness Improvement In AEC Era*.
- Kristina Sedyastuti (2018) Analisis pemberdayaan UMKM dan peningkatan daya saing dalam kancah pasar global.
- Masrudin, Rahayu Indriasari, and Jurana (2017) *Implementation of Telkom company partnership program in the SME Empowerment framework*.
- Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013).
- Muhammad Gobel (2016) implementasi kebijakan kredit usaha rakyat di Bank Rakyat Indonesia Unit Bahu Manado.
- Mulyana, Deddy. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pt Remaja Rosdakarya Offset.
- Noor, Henry Faizal. (2013). *Ekonomi Public*. Depok Tengah: Academia.
- Nugroho, D. Riant. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. elex Media Komputindo.
- Patilima, Hamid. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Permenko (2017). http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1224:program-kur-lampauitarget-kemenkop-dan-ukm-lakukan, diakses (13 February 2019).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: refikaaditama.
- Syamsuddin (2016) Analisis pemberian kredit usaha rakyat (KUR) Bank BRI terhadap kinerja Usaha Kecil Di Kota Makassar.

- Sumodiningrat, Gunawan.(2014).MenujuEkonomiBerdikari.Jakarta:Media Pressindo
- Steers, Richard. (1995).*Efisiensi Organisasi Dan Terjemahan Magdalena Jumin*. Jakarta :Erlangga
- Tarigan, Robinson. (2005). *Ekonomi Regional*.Medan:Bumi Aksara
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1984). *Perencanaan Pembangunan*.Jakarta:PT Gunung Agung
- UUNO.20.(2010):UMKM.http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1224:program-kur-lampauitarget-kemenkop-dan-ukm-lakukan, diakses (13February 2019).
- Winarno, Budi. (2002).*teoridan proses kebijakan public*.yogyakarta.mediapresindo
- Yanah,Hamlah Nakhwatunnisa,Tri Amalia Sukarno (2018) Staregy to Increase the Competitiveness of SME's Enterprises.
- Y.Munandar (2017) The effectivity of credit for businesses program (KUR) distribution in Maluku and Maluku utara provinces in periode of 2010-2014.
- Yusuf, Muri. (2013). *Metode Penelitian*.Padang:KencanaPremada media Group

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan structural pegawai Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro



Observasi dengan nasabah yang bernama Basri mengambil program KUR sejumlah 25 juta di BRI Syariah KCP Bojonegoro yang digunakan sebagai modal jualan bakso dan es kelapa muda



Observasi dengan nasabah yang bernama bapak Riza mengambil program KUR sejumlah 25 juta di BRI Syariah KCP Bojonegoro yang digunakan sebagai modal jualan toko



Observasi dengan nasabah yang bernama bapak Anto Subagio mengambil program KUR sejumlah 25 juta di BRI Syariah KCP Bojonegoro yang digunakan sebagai modal konveksi



Observasi dengan nasabah yang bernama bapak Midun mengambil program KUR sejumlah 25 juta di BRI Syariah KCP Bojonegoro yang digunakan sebagai modal toko Alat Tulis dan Peralatan Sekolah



Observasi dengan nasabah yang bernama Ibu Partiwi mengambil program KUR sejumlah 20 juta di BRI Syariah KCP Bojonegoro yang digunakan sebagai modal toko buah



Observasi dengan nasabah yang bernama Ibu Umi mengambil program KUR sejumlah 25 juta di BRI Syariah KCP Bojonegoro yang digunakan sebagai modal toko sembako



Observasi dengan nasabah yang bernama Bapak Agong mengambil program KUR sejumlah 25 juta di BRI Syariah KCP Bojonegoro yang digunakan sebagai modal service motor dan bengkel pengecatan motor



Observasi dengan nasabah yang bernama Bapak Bima mengambil program KUR sejumlah 20 juta di BRI Syariah KCP Bojonegoro yang digunakan sebagai modal obat herbal



Observasi dengan nasabah yang bernama Bapak Bambang mengambil program KUR sejumlah 20 juta di BRI Syariah KCP Bojonegoro yang digunakan sebagai modal warung kopi



Observasi dengan nasabah yang bernama Bapak Arik mengambil program KUR sejumlah 25 juta di BRI Syariah KCP Bojonegoro yang digunakan sebagai modal jualan buah

Lampiran 2. Hasil Wawancara

1. Narasumber : Bapak Riza Setiawan

Alamat : Krajan RT 04 RW 03 Ds. Sugihwaras Kec. Sugihwaras

UMKM : Toko sembako

Pra Implementasi

Koding	Jawaban
PRAUKM1	<p>a). Program KUR ialah program yang terdapat pada BRI Syariah yang memiliki suku bunga relatif rendah dan membantu bagi UMKM.</p> <p>b). Yang memberitahukan program KUR kepada saya ialah karyawan AO BRI Syariah KCP Bojonegoro</p> <p>c). Pada saat karyawan AO memberikan brosur program KUR di pasar</p> <p>d). Informasi yang saya peroleh dari karyawan BRI Syariah KCP Bojonegoro dan lembaga yang menaungi KUR ialah BRI.</p> <p>e). Alasan saya menggunakan program KUR karena program KUR sangat membantu dalam permodalan usaha yang saya miliki dan bunganya sangat ringan sehingga tidak memberi beban yang berlebihan kepada saya.</p> <p>f). Dalam usaha saya, sebelum mengambil program KUR belum begitu stabil dan modal yang saya peroleh masih kurang, untuk meberikan modal dalam usaha saya.</p>

IMPLEMENTASI

Koding	Jawaban
IMPUKM1	<p>a). KUR dapat membantu dalam usaha saya, selain itu KUR dapat meningkat usaha modal bisnis saya.</p> <p>b). Peran penting dalam realisasi KUR ialah nasabah UMKM dan Instansi program KUR yaitu BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>c). Pengajuan KUR yang saya ajukan pada tanggal 17 Juli 2018, kemudian di ACC oleh pihak Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro 3 hari setelah pengajuan. Tenor yang saya pinjam 25 juta di Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>d). Di BRI Syariah KCP Bojonegoro pelayanannya sangat baik dan profesional. Penjelasan atau pengarahan yang di berikan oleh pihak nasabah sangat baik.</p> <p>e). Alasan saya menggunakan program KUR ialah bunga yang diberikan ringan memiliki bunga 7% per tahun dan layanan yang diberikan sangat membantu bagi nasabah terutama di bidang UMKM.</p> <p>f). Usaha saya setelah melakukan peminjaman KUR di BRI Syariah KCP Bojonegoro sangat membantu dalam usaha saya dan proses dalam pengajuan program KUR mudah dan cepat.</p>

PASCA IMPLEMENTASI

Koding	Jawaban
	<p>a). Yang saya peroleh dalam program KUR ialah sangat membantu dalam pengembangan usaha saya dan memperingan dalam angsuran. Kelebihan dari program KUR</p>

PSCUKM1	<p>bunga ringan 0,3% per bulan dan pertahunnya hanya 7%.</p> <p>b). Yang diuntungkan dalam program KUR ialah UMKM.</p> <p>c). Pelunasan program KUR 1 tahun, angsurannya bagi UMKM per bulan dan bagi petani musiman antara 6 bulan sekali dalam per tahunnya.</p> <p>d). Usaha yang saya dirikan lokasinya ada di pasar Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras, keberlanjutan dalam usaha saya sangat maju dan baik.</p> <p>e). Dikarenakan program KUR sangat bermanfaat bagi usaha saya terutama pada tambahan pemasukan modal usaha saya. Kekurangan dari dana KUR hanya dibatasi pengambilan pinjaman hanya 25 juta.</p> <p>f). Implementasi program KUR menurut saya sudah baik dan efisien. Realisasi KUR sudah tepat dalam melakukan sasaran calon nasabah yang membutuhkan program KUR terutama pada bidang UMKM.</p>
---------	---

2. Narasumber Ibu Nita

Alamat : Jl. Merdeka Utara RT 03 RW 01 Ds. Sugihwaras Kec. Sugihwaras

UMKM : Toko sembako

Pra Implementasi

Koding	Jawaban
	<p>a). Program KUR adalah program yang ada di BRI Syariah yang memiliki bunga rendah dan membantu bagi UMKM.</p> <p>b). Karyawan AO atau marketing BRI Syariah KCP Bojonegoro</p> <p>c). Pada saat karyawan AO memberikan brosur program KUR di pasar</p> <p>d). Informasi yang saya peroleh dari karyawan BRI Syariah</p>

PRAUKM2	<p>KCP Bojonegoro dan lembaga yang menaungi KUR ialah BRI.</p> <p>e). Alasan saya menggunakan program KUR karena program KUR sangat membantu dalam permodalan usaha yang saya miliki dan bunganya sangat ringan sehingga tidak memberi beban yang berlebihan kepada saya.</p> <p>f). Sebelum mengambil program KUR belum begitu stabil dan modal yang saya peroleh masih kurang, untuk memberikan modal dalam usaha saya.</p>
---------	---

IMPLEMENTASI

Koding	Jawaban
IMPUKM2	<p>a). Sangat membantu sekali bagi usaha saya, selain itu KUR dapat meningkat usaha modal bisnis saya.</p> <p>b). Peran penting dalam realisasi KUR ialah nasabah UMKM dan Instansi Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>c). Pengajuan KUR yang saya ajukan pada tanggal 20 Agustus 2018, kemudian di ACC oleh pihak Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro 3 hari setelah pengajuan. Tenor yang saya pinjam 20 juta di Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>d). Pelayanannya sangat baik dan profesional. pengarahan yang di berikan oleh pihak nasabah sangat baik.</p> <p>e). Alasan saya menggunakan program KUR ialah bunga yang diberikan ringan memiliki bunga 7% per tahun dan layanan yang diberikan sangat membantu bagi nasabah terutama di bidang UMKM.</p> <p>f). Usaha saya setelah melakukan peminjaman KUR di BRI Syariah KCP Bojonegoro sangat membantu dalam usaha saya dan proses dalam pengajuan program KUR mudah</p>

PASCA IMPLEMENTASI

Koding	Jawaban
PRAUKM2	<p>a). Sangat membantu sekali bagi usaha saya, dan memperingan dalam angsuran. Kelebihan dari program KUR bunga ringan 0,3% per bulan dan pertahunnya hanya 7%.</p> <p>b). Yang diuntungkan dalam program KUR ialah UMKM.</p> <p>c). Pelunasan program KUR 1 tahun, angsurannya bagi UMKM per bulan dan bagi petani musiman antara 6 bulan sekali dalam per tahunnya.</p> <p>d). Usaha yang saya dirikan lokasinya ada di pasar Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras, keberlanjutan dalam usaha saya sangat maju dan baik.</p> <p>e). Dikarenakan program KUR sangat bermanfaat bagi usaha saya terutama pada tambahan pemasukan modal usaha saya. Kekurangan dari dana KUR hanya dibatasi pengambilan pinjaman hanya 20 juta.</p> <p>f). Implementasi program KUR menurut saya sudah baik. Realisasi KUR sudah tepat dalam melakukan sasaran calon nasabah yang membutuhkan program KUR terutama pada bidang UMKM.</p>

3. Narasumber Bapak Masrukin

Alamat : Jl. Merdeka Utara RT 03 RW 01 Ds. Sugihwaras Kec. Sugihwaras

UMKM : Konveksi

Pra Implementasi

Koding	Jawaban
PRAUKM3	<p>a). Program KUR merupakan program yang berada di BRI Syariah dengan bunga rendah.</p> <p>b). Karyawan AO atau marketing BRI Syariah KCP Bojonegoro</p> <p>c). Pada saat karyawan AO memberikan brosur program KUR di pasar dan sekitarnya.</p> <p>d). Informasi yang saya peroleh dari karyawan BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>e). Alasan saya dengan menggunakan program KUR karena program KUR dapat memberikan modal dalam usaha yang saya miliki dan bunga yang diberikan ringan.</p> <p>f). Sebelum mengambil program KUR usaha saya belum begitu stabil dikarenakan kekurangan modal.</p>

IMPLEMENTASI

Koding	Jawaban
	<p>a). Sangat membantu dalam kegiatan usaha yang saya miliki, selain itu KUR dapat memberikan peningkatan dalam usaha modal bisnis saya.</p> <p>b). Peran penting yang ada dalam realisasi KUR adalah nasabah UMKM dan Instasi Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>c). Pengajuan KUR yang saya ajukan pada tanggal 22 Agustus 2018, kemudian di ACC oleh pihak Bank BRI</p>

IMPUKM3	<p>Syariah KCP Bojonegoro 3 hari setelah pengajuan. Tenor yang saya pinjam 25 juta di Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>d). Pelayanan dan pengarahan yang di berikan oleh pihak nasabah sangat baik.</p> <p>e). Alasan saya menggunakan program KUR ialah memiliki bunga ringan yaitu sekitar bunga 7% per tahun dan layanan yang ada di program KUR dapat membantu bagi nasabah.</p> <p>f). Usaha saya setelah melakukan peminjaman KUR di BRI Syariah KCP Bojonegoro dengan meningkatkan usaha saya dan memanfaatkan sebaik mungkin.</p>
---------	--

PASCA IMPLEMENTASI

Koding	Jawaban
PRAUKM3	<p>a). Program KUR dapat membantu dalam usaha saya, dan memperingan dalam angsuran. Kelebihan dari program KUR bunga ringan 0,3% per bulan dan pertahunnya hanya 7%.</p> <p>b). Program KUR dapat memberikan keuntungan bagi UMKM.</p> <p>c). Program KUR dapat dilakukan pelunasan dalam jangka 1 tahun, angsurannya bagi UMKM per bulan dan bagi petani musiman antara 6 bulan sekali dalam setahun.</p> <p>d). Usaha yang saya dirikan lokasinya ada di pasar Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras, keberlanjutan dalam usaha saya sangat maju dan baik.</p> <p>e). Dikarenakan program KUR dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam usaha saya terutama pada tambahan pemasukan modal usaha saya. Kekurangan dari dana KUR hanya dibatasi pengambilan pinjaman hanya 25 juta.</p> <p>f). Implementasi program KUR menurut saya sudah memberikan respon yang sangat baik. Realisasi KUR sudah</p>

	tepat dalam melakukan sasaran bagi calon nasabah yang membutuhkan program KUR terutama pada bidang UMKM.
--	--

4. Narasumber Ibu Pratiwi

Alamat : Jl. Buyut Sendi RT 14 RW 03 Ds. Sugihwaras Kec. Sugihwaras

UMKM : Toko Buah

Pra Implementasi

Koding	Jawaban
PRAUKM4	<p>a). Program KUR merupakan program yang terdapat pada BRI Syariah dengan bunga yang ringan sehingga tidak membebani saya.</p> <p>b). Karyawan AO atau marketing BRI Syariah KCP Bojonegoro</p> <p>c). Pada saat karyawan AO memberikan brosur program KUR kepada masyarakat yang ada di sekitar pasar.</p> <p>d). Informasi yang saya dapat dari karyawan BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>e). Alasan saya dengan menggunakan program KUR karena program KUR dapat memberikan manfaat yang sangat besar misalnya dapat memberikan atau membantu dalam permodalan dalam usaha saya.</p> <p>f). Usaha saya sebelum mengambil program KUR masih dalam keadaan yang kurang baik yang disebabkan kekurangan modal.</p>

IMPLEMENTASI

Koding	Jawaban
IMPUKM4	<p>a). Sangat membantu dalam kegiatan usaha yang saya miliki, selain itu KUR dapat memberikan peningkatan dalam usaha modal bisnis saya.</p> <p>b). Peran penting yang ada dalam realisasi KUR adalah nasabah UMKM dan Instasi Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>c). Pengajuan KUR yang saya ajukan pada tanggal 30 Agustus 2018, kemudian di ACC oleh pihak Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro 3 hari setelah pengajuan. Tenor yang saya pinjam 25 juta di Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>d). Pelayanan, pengarahan dan respon yang di berikan oleh pihak nasabah sangat baik.</p> <p>e). Alasan saya dengan menggunakan program KUR ialah pengambilannya mudah dan cepat. Selain itu bunga yang diberikan ringan yaitu sekitar bunga 7% per tahun dan layanan yang ada di program KUR dapat membantu bagi nasabah.</p> <p>f). Usaha saya setelah melakukan peminjaman KUR di BRI Syariah KCP Bojonegoro dengan memberikan peningkatan dalam usaha yang saya miliki.</p>

PASCA IMPLEMENTASI

Koding	Jawaban
	<p>a). Program KUR dapat memberikan bantuan dalam usaha saya dikarenakan angsuran yang diberikan ringan. Kelebihan program KUR yaitu bunga yang diberikan relatif ringan yaitu 0,3% per bulan dan pertahunnya hanya bungan yang diberikan yaitu 7%.</p> <p>b). Program KUR memberikan keuntungan bagi UMKM yang</p>

PSCUKM4	<p>ada.</p> <p>c). Pelunasan program KUR dapat dilakukan dalam jangka 1 tahun, angsurannya yang diberikan bagi UMKM per bulan dan bagi petani pembayarannya secara musiman antara 6 bulan sekali per setahun.</p> <p>d).Usaha yang saya dirikan lokasinya ada di pasar Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras, keberlanjutan dalam usaha saya sangat maju dan baik.</p> <p>e). Dikarenakan program KUR dapat memberikan tambahan pemasukan modal usaha saya. Kekurangan dari dana KUR hanya dibatasi pengambilan pinjaman hanya 25 juta.</p> <p>f). Implementasi program KUR menurut saya sudah memberikan respon yang sangat baik bagi nasabah. Realisasi KUR sudah tepat dalam melakukan sasaran bagi nasabah.</p>
---------	---

5. Narasumber Bapak Midun

Alamat : Jl. Merdeka Utara RT 03 RW 01 Ds. Sugihwaras Kec. Sugihwaras

UMKM : Toko Peralatan Sekolah

Pra Implementasi

Koding	Jawaban
PRAUKM5	<p>a). Program KUR merupakan program yang terdapat pada BRI Syariah dengan bunga yang berikan relatif ringan.</p> <p>b). Karyawan AO atau marketing BRI Syariah KCP Bojonegoro</p> <p>c). Pada saat karyawan AO memberikan brosur program KUR kepada masyarakat setempat di pasar.</p> <p>d). Informasi yang saya peroleh dari karyawan BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>e). Alasan saya menggunakan program KUR adalah dapat membantu usaha saya dengan cara memberikan peminjaman</p>

	<p>modal</p> <p>f). Usaha saya yang miliki masih dalam kurang stabil pada saat belum mengambil program KUR disebabkan kekurangan modal.</p>
--	---

IMPLEMENTASI

Koding	Jawaban
IMPUKM5	<p>a). Program KUR sangat membantu dan memberikan peningkatan dalam usaha modal bisnis saya.</p> <p>b). Peran penting yang ada dalam realisasi KUR adalah nasabah UMKM dan Instansi Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>c). Pengajuan KUR yang saya ajukan pada tanggal 5 September 2018, kemudian di ACC oleh pihak Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro 3 hari setelah pengajuan. Tenor yang saya pinjam 25 juta di Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>d). Pelayanan, pengarahan dan respon yang di berikan oleh pihak nasabah sangat baik sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah.</p> <p>e). Alasan saya menggunakan program KUR bunga yang diberikan ringan yaitu sekitar bunga 7% per tahun dan layanan yang ada di program KUR dapat membantu bagi nasabah.</p> <p>f). Usaha saya setelah melakukan peminjaman KUR di BRI Syariah KCP Bojonegoro dengan memberikan peningkatan dalam usaha yang saya miliki.</p>

PASCA IMPLEMENTASI

Koding	Jawaban
PSCUKM5	<p>a). Program KUR dapat membantu usaha saya dikarenakan angsuran yang diberikan ringan. Kelebihan program KUR yaitu bunga ringan yaitu 0,3% per bulan dan pertahunnya bunganya yang diberikan yaitu 7%.</p> <p>b). Program KUR memberikan keuntungan bagi UMKM yang ada.</p> <p>c). Pelunasan program KUR dapat dilakukan dalam jangka 1 tahun, angsurannya dapat dilakukan bagi UMKM per bulan dan bagi petani pembayarannya secara musiman antara 6 bulan sekali per setahun.</p> <p>d). Usaha yang saya dirikan lokasinya ada di pasar Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras, keberlanjutan dalam usaha saya sangat maju dan baik.</p> <p>e). Dikarenakan program KUR dapat memberikan manfaat dalam usaha saya terutama pada tambahan pemasukan modal usaha saya. Kekurangan dari program KUR yaitu dana dibatasi pengambilan pinjaman hanya 25 juta.</p> <p>f). Implementasi program KUR menurut saya sudah memberikan respon yang sangat baik bagi nasabah. Realisasi KUR sudah tepat dalam melakukan sasaran bagi calon nasabah yang membutuhkan program KUR terutama pada UMKM.</p>

6. Narasumber Bapak Mubarak

Alamat : Jl. Buyut Sendi RT 04 RW 01 Ds. Sugihwaras Kec. Sugihwaras

UMKM : Toko Buah

Pra Implementasi

Koding	Jawaban
PRAUKM6	<p>a). Program KUR merupakan program yang dimiliki BRI Syariah dengan bunga yang diberikan ringan sehingga tidak membebani saya.</p> <p>b). Karyawan AO atau marketing BRI Syariah KCP Bojonegoro</p> <p>c). Pada saat karyawan AO memberikan brosur program KUR kepada masyarakat yang ada di sekitar pasar.</p> <p>d). Informasi yang saya dapat dari karyawan BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>e). Alasan saya dengan menggunakan program KUR karena program KUR dapat memberikan pengaruh yang sangat baik dalam usaha saya dengan memberikan pinjaman modal.</p> <p>f). Sebelum mengambil program KUR usaha yang saya miliki masih dalam keadaan yang kurang baik yang disebabkan kekurangan modal untuk melakukan pengembangan.</p>

IMPLEMENTASI

Koding	Jawaban
IMPUKM6	<p>a). Program KUR sangat membantu usaha yang saya miliki, selain itu KUR dapat membantu peningkatan dalam usaha bisnis saya.</p> <p>b). Peran penting dalam realisasi KUR adalah bagi nasabah UMKM dan Instansi Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p>

	<p>c). Pengajuan KUR yang saya ajukan pada tanggal 15 September 2018, kemudian di ACC oleh pihak Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro 3 hari setelah pengajuan. Tenor yang saya pinjam 25 juta di Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>d). Pelayanan yang di berikan oleh pihak nasabah sangat baik.</p> <p>e). Alasan saya dengan menggunakan program KUR bunga yang diberikan ringan yaitu sekitar bunga 7% per tahun dan layanan yang ada di program KUR dapat membantu bagi nasabah.</p> <p>f). Usaha saya setelah melakukan peminjaman KUR di BRI Syariah KCP Bojonegoro mengalami peningkatan dalam usaha saya.</p>
--	---

PASCA IMPLEMENTASI

Koding	Jawaban
PRAUKM6	<p>a). Program KUR dapat memberikan bantuan dalam usaha saya dengan memberikan pinjaman modal dengan angsuran yang diberikan ringan. Kelebihan program KUR yaitu bunga ringan yaitu 0,3% per bulan dan pertahunnya bunga yang diberikan yaitu 7%.</p> <p>b). Program KUR memberikan keuntungan bagi UMKM.</p> <p>c). Pelunasan program KUR dapat dilakukan dengan pembayaran jangka 1 tahun sekali, angsurannya yang diberikan bagi UMKM per bulan dan bagi musiman antara 6 bulan sekali dalam setahun.</p> <p>d).Usaha yang saya dirikan lokasinya ada di pasar Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras, keberlanjutan dalam usaha saya sangat maju dan baik.</p>

	<p>e). Dikarenakan program KUR dapat memiliki peran penting yaitu berikan tambahan pemasukan modal usaha saya sehingga dapat meningkatkan usaha saya. Kekurangan dari dana KUR hanya dibatasi pengambilan pinjaman hanya 25 juta.</p> <p>f). Implementasi program KUR menurut saya sudah memberikan respon yang sangat baik. Realisasi KUR sudah tepat dalam melakukan sasaran bagi calon nasabah</p>
--	---

7. Narasumber Bapak Hari

Alamat : Jl. Buyut Sendi RT 04 RW 01 Ds. Sugihwaras Kec. Sugihwaras

UMKM : Jamu Herbal

Pra Implementasi

Koding	Jawaban
PRAUKM7	<p>a). Program KUR merupakan program yang dimiliki oleh Bank BRI Syariah yang memiliki bunga relatif ringan.</p> <p>b). Marketing atau karyawan AO BRI Syariah KCP Bojonegoro</p> <p>c). Pemberian brosur oleh karyawan AO diberikan kepada masyarakat yang ada di sekitar pasar.</p> <p>d). Informasi yang saya peroleh dari karyawan BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>e). Alasan saya menggunakan program KUR dikarenakan program KUR memiliki manfaat yang sangat besar misalnya dapat memberikan atau membantu dalam permodalan dalam usaha saya.</p> <p>f). Sebelum saya mengambil program KUR usaha yang saya miliki masih dalam keadaan yang kurang baik atau stabil, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya modal.</p>

IMPLEMENTASI

Koding	Jawaban
IMPUKM7	<p>a). Program KUR dapat membantu dalam usaha yang saya miliki dengan memberikan peminjaman modal sehingga bisnis yang saya miliki dapat berkembang.</p> <p>b). Realisasi KUR memiliki peran penting bagi nasabah UMKM dan Instansi Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>c). Pengajuan KUR yang saya ajukan pada tanggal 25 September 2018, kemudian di ACC oleh pihak Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro 3 hari setelah pengajuan. Tenor yang saya pinjam 20 juta di Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>d). Saya mengajukan KUR di Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro. Pelayanan program KUR yang diberikan oleh pihak nasabah sangat baik.</p> <p>e). Alasan saya dengan menggunakan program KUR ialah bunga yang diberikan yaitu 7% per tahun dan pelayanan yang ada di program KUR dapat membantu bagi nasabah.</p> <p>f). Usaha saya setelah melakukan peminjaman KUR di BRI Syariah KCP Bojonegoro dana yang dipinjamkan saya manfaatkan sebaik mungkin dengan cara memberikan peningkatan dalam usaha yang saya miliki. Pengajuan KUR dilakukan 3 hari sebelum pencairan dana.</p>

PASCA IMPLEMENTASI

Koding	Jawaban
PSCUKM7	<p>a). Saya menggunakan program KUR dapat memberikan modal dalam usaha saya, sehingga bisnis yang saya miliki dapat maju dan berkembang. Kelebihan menggunakan program KUR yaitu bunga ringan yaitu 0,3% per bulan dan total bunga pertahunnya yaitu 7%.</p> <p>b). Program KUR memberikan keuntungan bagi UMKM sehingga dapat berkembang dengan baik.</p> <p>c). Program KUR dapat dilakukan pelunasan dalam jangka 1 tahun, angsurannya yaitu per bulan bagi UMKM dan bagi petani pelunasannya musiman antara 6 bulan sekali dalam setahun.</p> <p>d).Usaha yang saya dirikan lokasinya ada di pasar Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras, keberlanjutan dalam usaha saya sangat maju dan baik.</p> <p>e). Dikarenakan program KUR dapat memberikan tambahan pemasukan modal usaha saya sehingga dapat meningkatkan usaha saya. Kekurangan dari dana KUR hanya dibatasi pengambilan pinjaman hanya 25 juta.</p> <p>f). Implementasi program KUR menurut saya sudah memberikan pelayanan yang sangat baik bagi nasabah sehingga tidak membingungkan saat pengambilkan dana. Realisasi KUR sudah tepat dalam melakukan sasaran bagi calon nasabah yang membutuhkan.</p>

8. Narasumber Bapak Agung

Alamat : Jl. Jabon RT 01 RW 01 Ds. Sugihwaras Kec. Sugihwaras

UMKM : Bengkel dan Pengecatan motor

Pra Implementasi

Koding	Jawaban
PRAUKM8	<p>a). Program KUR merupakan program yang memeberikan pinjaman modal dengan bunga yang relatif kecil. Selain itu program KUR merupakan program yang ada pada Bank BRI Syariah.</p> <p>b). Karyawan AO atau marketing BRI Syariah KCP Bojonegoro</p> <p>c). Pemberian brosur kepada masyarakat sekitar pasar yang diberikan oleh karyawan AO.</p> <p>d). Informasi yang saya peroleh dari karyawan BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>e). Alasan saya menggunakan program KUR karena program KUR memberikan pinjaman modal dengan cara yang mudah.</p> <p>f). Sebelum pengambilan dana usaha yang saya masih dalam keadaan yang kurang baik dikarenakan modal yang saya miliki masih kurang.</p>

IMPLEMENTASI

Koding	Jawaban
IMPUKM8	<p>a). Program KUR memiliki perasn yang sangat penting dalam usaha saya, karena adanya program KUR dapat membantu saya dengan memberikan pinjaman modal sehingga usaha yang saya milkiki dapat berkembang dengan baik.</p> <p>b). Peran penting dalam realisasi KUR adalah bagi nasabah</p>

	<p>UMKM dan Instansi Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>c). Pengajuan KUR yang saya ajukan pada tanggal 03 Oktober 2018, kemudian di ACC oleh pihak Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro 3 hari setelah pengajuan. Tenor yang saya pinjam 25 juta di Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>d). Pelayanan yang di berikan oleh pihak nasabah sangat baik dan persyaratan yang diberikan pada saat pengajuan atau pengambilan juga mudah.</p> <p>e). Alasan saya menggunakan program KUR yaitu bunga yang diberikan ringan yaitu 7% per tahun.</p> <p>f). Usaha saya setelah melakukan peminjaman KUR di BRI Syariah KCP Bojonegoro sudah mulai stabil dikarenakan modal yang diberikan sudah cukup untuk melakukan pengembangan.</p>
--	---

PASCA IMPLEMENTASI

Koding	Jawaban
PSCUKM8	<p>a). Program KUR dapat memberikan pinjaman modal dengan angsuran yang diberikan lebih ringan sehingga tidak membebani saya. Kelebihan penggunaan program KUR yaitu bunga ringan yaitu 0,3% per bulan dan pertahunnya yaitu 7%.</p> <p>b). Program KUR memberikan keuntungan bagi UMKM sehingga dapat meningkat dan berkembang.</p> <p>c). Pelunasan program 1 tahun sekali, angsurannya yang diberikan bagi UMKM per bulan dan bagi musiman antara 6 bulan sekali dalam setahun.</p> <p>d).Usaha yang saya dirikan lokasinya ada di pasar Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras, keberlanjutan dalam</p>

	<p>usaha saya sangat maju dan baik.</p> <p>e). Dikarenakan program dapat berikan tambahan pemasukan modal usaha saya sehingga dapat meningkatkan usaha saya. Kekurangan dari dana KUR hanya dibatasi pengambilan pinjaman hanya 25 juta.</p> <p>f). Implementasi program KUR menurut saya sudah memberikan respon yang sangat baik bagi nasabah. Realisasi KUR sudah tepat dalam melakukan sasaran bagi nasabah</p>
--	---

9. Narasumber Bapak Basri

Alamat : Jl. Serdadu Barat Sendi RT 11 RW 05 Ds. Sugihwaras Kec. Sugihwaras

UMKM : Pedang Bakso dan Es Kelapa Muda

Pra Implementasi

Koding	Jawaban
PRAUKM9	<p>a). Program KUR merupakan program yang memberikan bunga yang sangat ringan dan program KUR merupakan program yang terdapat pada bank BRI syariah.</p> <p>b). Marketing atau karyawan AO BRI Syariah KCP Bojonegoro</p> <p>c). Pada saat pemveraian brosur kepada karyawan AO diberikan kepada masyarakat yang ada di sekitar pasar.</p> <p>d). Informasi yang saya peroleh dari karyawan BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>e). Dengan menggunakan program KUR dapat memberikan pinjaman dana sebagai modal dalam usaha bisnis saya.</p> <p>f). Sebelum saya mengambil program KUR usaha yang saya miliki masih dalam keadaan kurang stabi.l</p>

IMPLEMENTASI

Koding	Jawaban
IMPUKM9	<p>a). Program KUR memberikan peminjaman modal sehingga bisnis yang saya miliki dapat berkembang.</p> <p>b). Realisasi KUR memiliki peran penting bagi nasabah UMKM dan Instansi Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>c). Pengajuan KUR yang saya ajukan pada tanggal 10 Oktober 2018, kemudian di ACC oleh pihak Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro 3 hari setelah pengajuan. Tenor yang saya pinjam 20 juta di Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>d). Saya mengajukan program KUR di Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro. Program KUR memberikan pengarahannya yang sangat baik sehingga memberikan kemudahan saat pengajuan dana.</p> <p>e). Dengan menggunakan program KUR memberikan bunga yang sangat kecil yaitu 7% per tahun.</p> <p>f). Usaha saya setelah melakukan peminjaman KUR di BRI Syariah KCP Bojonegoro saya akan melakukan pengembangan usaha saya dengan cara melakukan penambahan menu atau penambahan. Pengajuan KUR dilakukan 3 hari sebelum pencairan dana.</p>

PASCA IMPLEMENTASI

Koding	Jawaban
PSCUKM9	<p>a). Dengan menggunakan program KUR dapat memberikan bantuan modal dalam usaha saya, sehingga bisnis yang saya miliki dapat maju dan berkembang. Kelebihan program KUR yaitu bunga ringan yaitu 0,3% per bulan dan total bunga pertahunnya yaitu 7%.</p> <p>b). Program KUR memberikan keuntungan bagi UMKM.</p>

- c). Pelunasan program KUR dapat dilakukan dalam jangka 1 tahun, angsurannya dilakukan yaitu bagi petani pelunasannya musiman antara 6 bulan sekali dalam setahun dan per bulan bagi UMKM.
- d). Usaha yang saya dirikan lokasinya ada di pasar Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras, keberlanjutan dalam usaha saya sangat maju dan baik.
- e). Dikarenakan program KUR dapat memberikan tambahan pemasukan modal usaha saya dengan bunga yang tidak terlalu tinggi sehingga dapat meningkatkan usaha saya. Kekurangan dari dana KUR hanya dibatasi pengambilan pinjaman hanya 25 juta.
- f). Implementasi program KUR menurut saya sudah memberikan pelayanan yang sudah memuaskan bagi nasabah sehingga tidak membingungkan saat pengambilan dana ataupun pengajuan dana. Realisasi KUR sudah tepat dalam melakukan sasaran bagi calon nasabah yang membutuhkan.

10. Narasumber : Bapak Muhammad Yusuf

Alamat : Jl. Buyut Sendi RT 04 RW 03 Ds. Sugihwaras Kec. Sugihwaras

UMKM : Pedagang Kaki Lima

Pra Implementasi

Koding	Jawaban
PRAUKM10	<p>a). Program KUR merupakan program yang memiliki bunga ringan dan terdapat pada BRI Syariah.</p> <p>b). Yang memberitahukan program KUR kepada saya ialah karyawan AO BRI Syariah KCP Bojonegoro</p> <p>c). Pada saat karyawan AO memberikan brosur program KUR di pasar kepada masyarakat setempat.</p> <p>d). Informasi yang saya peroleh dari karyawan BRI Syariah</p>

	<p>KCP Bojonegoro dan lembaga yang menaungi KUR ialah BRI.</p> <p>e). Alasan saya menggunakan program KUR karena program KUR memberikan pinjaman dana sehingga bisa saya jadikan modal dalam usaha yang saya miliki.</p> <p>f). Usaha saya sebelum mengambil program KUR masih dalam keadaan kurang baik.</p>
--	---

IMPLEMENTASI

Koding	Jawaban
IMPUKM10	<p>a). KUR dapat membantu dalam usaha bisnis yang saya miliki, selain itu KUR dapat meningkat usaha modal bisnis saya.</p> <p>b). Peran penting dalam realisasi KUR ialah nasabah UMKM dan Instansi program KUR yaitu BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>c). Pengajuan KUR yang saya ajukan pada tanggal 01 November 2018, kemudian di ACC oleh pihak Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro 3 hari setelah pengajuan. Tenor yang saya pinjam 25 juta di Bank BRI Syariah KCP Bojonegoro.</p> <p>d). Di BRI Syariah KCP Bojonegoro pelayanan dan pengarahan yang diberikan sudah baik.</p> <p>e). Alasan saya menggunakan program KUR ialah bunga yang diberikan ringan memiliki bunga 7% per tahun dan layanan yang diberikan sangat membantu bagi nasabah terutama di bidang UMKM.</p> <p>f). Usaha saya setelah melakukan peminjaman KUR di BRI Syariah KCP Bojonegoro sangat membantu, dikarenakan memberikan pinjaman modal untuk pengembangan bisnis.</p>

PASCA IMPLEMENTASI

Koding	Jawaban
PSCUMK10	<p>a).Program KUR sangat membantu dalam pengembangan usaha saya dan memperingan dalam angsuran. Kelebihan dari program KUR yaitu bunga ringan 0,3% per bulan dan pertahunnya hanya 7%.</p> <p>b). Yang diuntungkan dalam program KUR ialah UMKM.</p> <p>c). Pelunasan program KUR dapat dilakuakn dalam jangka 1 tahun, angsurannya bagi petani musiman antara 6 bulan sekali dalam per tahunnya dan bagi UMKM per bulan.</p> <p>d). Usaha yang saya dirikan lokasinya ada di pasar Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras, keberlanjutan dalam usaha saya sangat maju dan baik.</p> <p>e). Dikarenakan program KUR sangat bermanfaat bagi usaha yang saya miliki terutama memberikan pijaman dana yang dapat dijadikan tambahan pemasukan modal usaha saya. Kekurangan dari dana KUR hanya dibatasi pengambilan pinjaman hanya 25 juta.</p> <p>f). Implementasi program KUR menurut saya sudah memuaskan dan efisien dalam segala hal. Realisasi KUR sudah tepat dalam melakukan sasaran calon nasabah</p>



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Mohammad Rifky Bayhaqi
NIM : 15540040
Pembimbing : Kusnudin, S.Pi., M.Ei
Judul Skripsi : Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI
Syariah KCP Bojonegoro Pada UMKM di Kecamatan
Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	13 Maret 2019	Latar Belakang KUR BRI Syariah (BAB I)	1.
2	14 Maret 2019	Perbaikan tentang jurnal dan penambahan jurnal.	2.
3	28 Maret 2019	Perbaikan kerangka berpikir. (BAB III)	3.
4	04 April 2019	Perbaikan teknik pengambilan sample (BAB III)	4.
5	25 April 2019	Pembahasan tentang Implementasi KUR (BAB IV)	5.
6	26 April 2019	Perbaikan penulisan skripsi	6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.

Malang,
Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syaria'ah



Eko Supravitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Zuraidah, S.E., M.SA
NIP : 197612102009122001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :
Nama : Mohammad Rifky Bayhaqi
NIM : 15540040
Handphone : +62831-1757-3332
Konsentrasi : Keuangan
Email : rifynila16@gmail.com
Judul Skripsi : Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Syariah KCP
Bojonegoro Pada UMKM di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report* :

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
22%	22%	2%	6%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 10 Desember 2019

UP2M

Zuraidah, S.E., M.SA
197612102009122001







10 repo.iain-tulungagung.ac.id
Internet Source

1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches Off

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

